



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.125 Telp -

Fax. – E mail : damkargresik65@gmail.com

G R E S I K 61121

Gresik, 26 Februari 2026

Nomor : 000.8.6.3/171/437.97/2026

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Gresik

Perihal : Laporan Kinerja (LKJiP)

di –

DAMKAR Tahun 2025

G R E S I K

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan laporan kinerja (LKJiP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



SUYONO, SH.S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680314 199309 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 000.8.6.3/171/437.97/2026s
TENTANG LAPORAN KINERJA (LKJiP)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026



LAKIN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor. 125 Kebomas Gresik

No. Tlp : 031 3991348

Website : damkar.gresikkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban strategis yang menyajikan capaian kinerja organisasi dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang penuh dengan dinamika transisional. Periode tahun 2025 memiliki signifikansi yang sangat krusial mengingat posisinya sebagai jembatan kebijakan antara penyelesaian seluruh target Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 dengan fase awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029. Harmonisasi kedua dokumen perencanaan tersebut menjadi prioritas utama guna menjamin kesinambungan arah kebijakan organisasi serta mencegah terjadinya diskontinuitas dalam penyediaan pelayanan publik esensial bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Capaian kinerja utama DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, ditandai dengan keberhasilan merealisasikan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran sebesar 100%. Indikator strategis Penurunan Kejadian Kebakaran berhasil direalisasikan sebesar 12,99%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 12%. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara agregat mencapai angka 91,75, di mana layanan pemadaman dan penyelamatan secara spesifik meraih skor 92,86, melampaui ekspektasi yang direncanakan. Prestasi ini diraih meskipun organisasi sedang menavigasi tantangan penyesuaian target waktu tanggap (response time) menuju target berbasis realisme fiskal sebesar 48,83 menit demi menjaga akuntabilitas perencanaan yang terukur.

Ditinjau dari aspek tata kelola internal, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPKP Gresik pada tahun 2025 mencapai skor 81,96 dengan predikat "A" (Memuaskan). Realisasi anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung program-program prioritas, khususnya pada transformasi misi organisasi di mana permintaan terhadap layanan penyelamatan non-kebakaran (rescue) kini mencapai 1.311 layanan, mendominasi beban kerja operasional harian dibandingkan layanan pemadaman konvensional yang berjumlah 260 insiden. Melalui LKJiP ini, DPKP Gresik menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia demi terwujudnya Kabupaten Gresik yang aman dan berketahanan bencana.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, saya dengan ini mempersembahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (DPKP Gresik) untuk tahun 2025 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

Laporan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang tak kenal lelah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi nyawa, harta benda, dan lingkungan dari ancaman kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

Melalui LKJiP ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pencapaian kinerja kami selama tahun 2025, serta tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam melaksanakan tugas kami. Kami juga dengan rendah hati menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam upaya kami untuk meningkatkan layanan dan efektivitas operasional kami.

Kami sadar akan tanggung jawab besar yang terletak pada pundak kami untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan dengan keyakinan kami pada semangat kebersamaan dan dedikasi, kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja layanan kami di masa yang akan datang.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam menjalankan tugas kami.

Semoga LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan masyarakat. Kritik dan saran yang membangun selalu kami terima dengan tangan terbuka.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



SUYONO, SH.S.Sos.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199309 1 002

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	5
1.3. Fungsi dan Tugas	6
1.3.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan SOTK DAMKAR:	7
1.3.2. Landasan Hukum:.....	7
1.3.3. Implementasi Tugas dan Fungsi:	8
1.4. Sumber Daya Manusia	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Ringkasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	13
2.1.1. Keselarasan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	16
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.2. Pohon Kinerja (Performance Tree) dan Mekanisme Cascading	23
2.2.1. Pohon Kinerja (Performance Tree)	24
2.2.2. Cascading	26
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	43
2.3.1. Perjanjian Kinerja APBD 2025	44

2.3.2.	Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025	45
2.3.3.	Perjanjian Kinerja APBD 2025 Perubahan	46
2.3.4.	Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025 Perubahan	47
2.4.	Penyelarasan Program dengan Prioritas Daerah.....	49
2.4.1.	Integrasi dengan Nawa Karsa dan Prioritas Sektoral.....	49
2.4.2.	Klasifikasi, Pembatasan, dan Benchmarking Strategis.....	50
2.4.3.	Union dan Harmonisasi Kebijakan Transisi	50
2.4.4.	Justifikasi Kebutuhan Anggaran Strategis dan Paradoks Kapasitas 51	
2.4.5.	Analisis Jangkauan Pelayanan dan Identifikasi <i>Blind Spot</i>	51
2.5.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	52
2.5.1.	Gambaran Umum.....	52
2.5.2.	Rencana Program dan Kegiatan.....	54
2.5.3.	Alokasi Anggaran Strategis	58
2.5.4.	Keterkaitan Rencana Kerja dengan Anggaran	58
2.5.5.	Strategi Pelaksanaan.....	59
2.5.6.	Antisipasi Risiko.....	59
2.6.	Target Kinerja Tahunan	60
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
3.1.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
3.1.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	64
3.1.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	65
3.1.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis	67
3.2.	Capaian Kinerja SPM.....	70

3.2.1.	Identifikasi Tantangan dan Hambatan Struktural.....	73
3.2.2.	Rekomendasi Solusi Strategis	75
3.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	77
3.4.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	78
3.4.1.	Statistik Layanan Kebakaran dan Penyelamatan	80
3.4.2.	Analisis Penyebab Keberhasilan	81
3.4.3.	Analisis Penyebab Kegagalan	82
3.4.4.	Pernyataan Keberhasilan dan Komitmen Kinerja	83
3.4.5.	Tindak Lanjut Atas Evaluasi Kinerja.....	84
3.5.	Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	84
3.5.1.	Ringkasan Distribusi Anggaran	90
3.5.2.	Kaitan Alokasi dengan Pencapaian Tujuan	91
3.5.3.	Prioritas Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Sasaran	91
3.5.4.	Mekanisme Efisiensi dan Pengendalian Anggaran	92
3.5.5.	Rekomendasi Penganggaran untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan	92
3.6.	Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	93
3.7.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	93
3.7.1.	Realisasi Anggaran	93
3.7.2.	Realisasi Anggaran SPM	96
3.7.3.	Analisa Capaian dan Anggaran Terhadap SPM.....	100
3.7.4.	Analisa Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja DPKP Gresik	100
	BAB IV PENUTUP.....	101
4.1.	Kesimpulan Kinerja Strategis Tahun 2025	101

4.2. Rekomendasi Strategis Masa Depan	101
---	-----

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 Matriks Keselarasan Visi Misi Bupati Gresik	14
TABEL II-2 Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis	16
TABEL II-3 Analisis Transisi IKU DPKP Gresik	19
TABEL II-4 IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	21
TABEL II-5 Pohon Kinerja	25
TABEL II-6 Cascading Kinerja	28
TABEL II-7 Perjanjian Kinerja APBD 2025	44
TABEL II-8 Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025	45
TABEL II-9 Perjanjian Kinerja APBD 2025 Perubahan	46
TABEL II-10 Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025 Perubahan	47
TABEL II-11 Rencana Program dan Kegiatan	54
TABEL II-12 Proporsi Alokasi Anggaran	58
TABEL II-13 Target Kinerja Utama	60
TABEL II-14 Target Kinerja Program	60
TABEL II-15 Target Kinerja Kegiatan	60
TABEL III-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	63
TABEL III-2 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 dengan Target Perjanjian Kinerja	64
TABEL III-3 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 dengan Target Perjanjian Kinerja	65
TABEL III-4 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 dengan Tahun Sebelumnya	66
TABEL III-5 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 dengan Tahun Sebelumnya	67
TABEL III-6 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 dibandingkan dengan Target Rencana Strategis	68
TABEL III-7 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 dibandingkan dengan Target Rencana Strategis	69
TABEL III-8 Capaian Kinerja SPM DAMKAR 2025	71
TABEL III-9 Tabel Benchmarking Kinerja	77
TABEL III-10 Capaian Kinerja Indikator	78
TABEL III-11 Nilai Sakip	79
TABEL III-12 Alokasi Anggaran	86
TABEL III-13 Realisasi Anggaran	94

TABEL III-14 REALISASI ANGGARAN SPM	96
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil menuntut adanya sistem pertanggungjawaban kinerja yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) menjadi instrumen strategis bagi setiap perangkat daerah untuk menyajikan capaian kinerja secara komprehensif, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. LKJIP juga berperan sebagai media akuntabilitas publik yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik, sebagai perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, memegang peranan vital dalam arsitektur ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pelayanan ini merupakan manifestasi nyata dari pemenuhan hak dasar warga negara atas rasa aman, perlindungan jiwa, serta pengamanan harta benda dari ancaman bencana, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka konstitusional negara.

Tahun 2025 merupakan periode yang memiliki keunikan tersendiri dalam siklus perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik. Sebagai tahun transisi, DPKP Gresik berada pada titik temu antara dua periode perencanaan strategis: penyelesaian amanat Renstra 2021–2026 serta pengawalan transisi menuju visi baru dalam Renstra 2025–2029. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan yang sangat cermat guna memastikan setiap target kinerja tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta arah kebijakan Kepala Daerah. Harmonisasi tersebut sangat penting agar organisasi terhindar dari kevakuman strategi maupun tumpang tindih indikator yang dapat mengganggu kualitas pelayanan publik.

Selain itu Tahun 2025 merupakan periode yang memiliki dinamika tinggi bagi DPKP Gresik, selain berlangsungnya masa transisi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan, memiliki dampak pada penyesuaian sejumlah indikator kinerja serta penataan kembali prioritas program dan kegiatan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan efisiensi anggaran dalam skala luas turut memengaruhi kapasitas operasional perangkat daerah, terutama dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk alat pelindung diri, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pasukan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang direncanakan bagi dua puluh personel. Situasi ini menempatkan LKJIP Tahun 2025 sebagai dokumen yang memiliki nilai strategis dalam merekam kinerja secara objektif di tengah perubahan lingkungan kebijakan dan fiskal.

Dalam perspektif ekonomi makro, Kabupaten Gresik saat ini sedang mengalami akselerasi industrialisasi yang pesat, ditandai dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE). Dinamika ini secara langsung berimplikasi pada eskalasi profil risiko bencana, baik yang bersifat kebakaran industri maupun kecelakaan yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). DPKP Gresik memiliki peran strategis sebagai penjamin stabilitas ekonomi melalui penyediaan layanan proteksi yang andal terhadap aset-aset investasi nasional serta infrastruktur publik yang vital. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang masif serta mendegradasi kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha di daerah.

Dari perspektif konstitusional, pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan jiwa serta harta benda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan sub-urusan kebakaran sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Kerangka ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur jenis layanan, indikator kinerja, dan standar mutu pelayanan kebakaran yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang berorientasi kinerja, penyusunan LKJIP juga merupakan amanat dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya pelaporan kinerja sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Secara administratif, capaian indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Namun dari sudut pandang substantif, masih terdapat tantangan struktural yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Disparitas spasial pelayanan menjadi salah satu isu strategis, di mana kawasan perkotaan cenderung memperoleh akses layanan yang lebih responsif, sementara wilayah penyangga dan kepulauan seperti Pulau Bawean, Dudusampeyan, Wringinanom, Manyar, Bungah pada sisi Pantura, serta Panceng menghadapi tantangan waktu tanggap yang lebih panjang akibat karakteristik geografis dan dukungan operasional yang beragam. Kondisi armada tertentu turut memengaruhi efektivitas penanganan kebakaran lahan kosong dan sampah di tepi jalan, sementara keterbatasan jumlah inspektur proteksi kebakaran yang memiliki sertifikasi teknis berdampak pada cakupan inspeksi dan pengawasan.

Pada sub-urusan penyelamatan, ketersediaan sarana rescue memengaruhi daya jangkau layanan pencarian dan pertolongan terhadap seluruh permintaan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai dokumen yang menyajikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub-bidang pemadam kebakaran. LKJIP ini memuat informasi kinerja yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup capaian sasaran strategis, realisasi program dan kegiatan, serta analisis atas faktor-faktor yang memengaruhi kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini juga menjadi sarana refleksi kelembagaan dalam rangka memperkuat penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ke depan, hasil LKJIP diharapkan menjadi landasan dalam penguatan tata kelola operasional berbasis risiko, optimalisasi unit reaksi cepat sesuai tipologi wilayah, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui internalisasi pengetahuan teknis dan mekanisme transfer of knowledge. Sinkronisasi lintas sektor dengan perangkat daerah dan instansi terkait juga dipandang strategis untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan penyelamatan, sehingga pembagian beban kerja berlangsung secara proporsional dan sinergis. Dengan demikian, LKJIP Tahun 2025 diharapkan mampu merepresentasikan kinerja yang mencerminkan kehadiran pemerintah daerah dalam menjalankan mandat konstitusional perlindungan jiwa dan harta benda bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Adapun Tujuan penyusunan LKJiP adalah untuk :

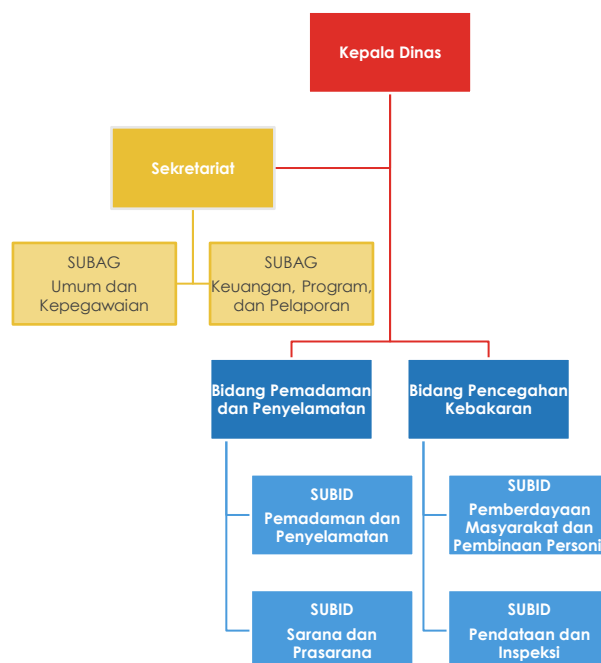
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja DAMKAR Gresik Tahun 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DAMKAR Gresik Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi menjadi acuan perbaikan dan peningkatan kinerja DAMKAR GRESIK di tahun berikutnya.

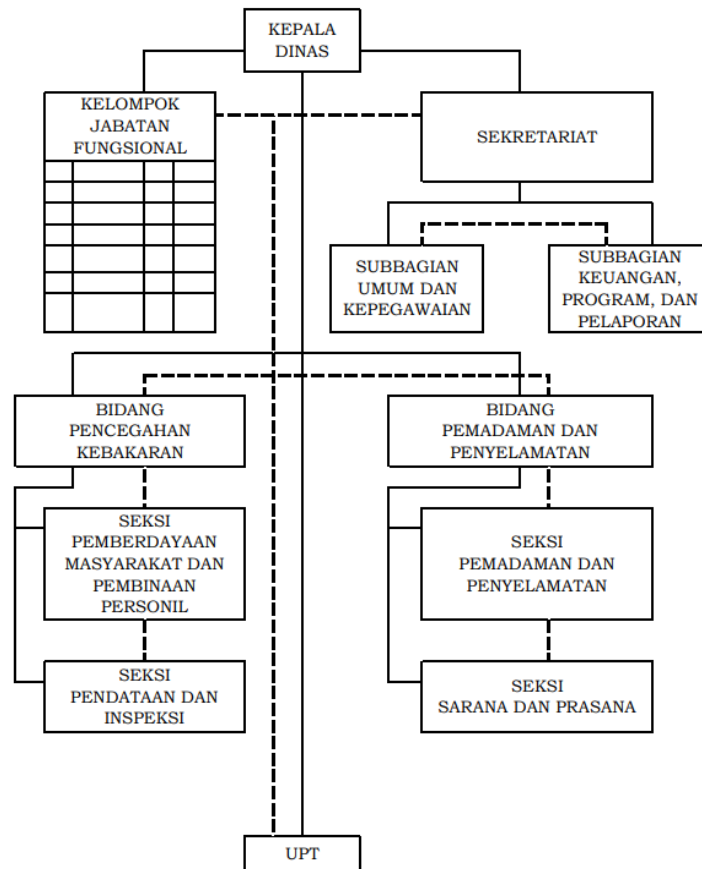
1.2. Struktur Organisasi

Merujuk pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (SOTK DAMKAR), struktur organisasi DAMKAR GRESIK pada Tahun terdiri atas Kepala Dinas yang dibantu Oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
3. Bidang Pencegahan Kebakaran;
4. UPT dan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DAMKAR GRESIK Tahun 2025



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Berdasar SOTK

1.3. Fungsi dan Tugas

Tugas dan Fungsi utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Gresik adalah Menjaga Keselamatan dan Keamanan Masyarakat, agar tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat gresik. Peran DAMKAR Gresik yang krusial dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh khususnya SOTK DAMKAR serta berbagai regulasi terkait. Berikut adalah gambaran mengenai tugas dan fungsi DAMKAR Gresik serta landasan hukum yang mengaturnya:

1.3.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan SOTK DAMKAR:

DAMKAR Gresik, sesuai dengan SOTK DAMKAR, bertanggung jawab sebagai pelaksana urusan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di wilayah Kabupaten Gresik.

Urusan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1.3.2. Landasan Hukum:

Berikut merupakan Regulasi yang menjadi landasan hukum dan pedoman teknis DAMKAR Gresik dalam menjalankan Fungsi Dan Tugas yang melengkapi dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (SOTK DAMKAR).

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007: Merupakan regulasi yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi penentuan tugas dan fungsi DAMKAR Gresik sebagai pelaksana urusan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Regulasi SPM): Regulasi ini mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. SPM ini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar, termasuk bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota: Regulasi ini menjadi pedoman penting yang mengatur standar teknis dalam penyelenggaraan layanan pemadam kebakaran di tingkat kabupaten/kota.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota: Regulasi ini menjadi pedoman penting yang mengatur standar teknis dalam penyelenggaraan layanan pemadam kebakaran di tingkat kabupaten/kota.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025: Regulasi ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan peran DAMKAR Gresik sebagai penunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan Pembangunan kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (SOTK DAMKAR): Regulasi ini merupakan regulasi utama yang menjabarkan tentang tugas dan fungsi DAMKAR GRESIK sebagai perangkat daerah di Kabupaten Gresik.

1.3.3. Implementasi Tugas dan Fungsi:

Secara umum DAMKAR Gresik menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam empat bidang strategis:

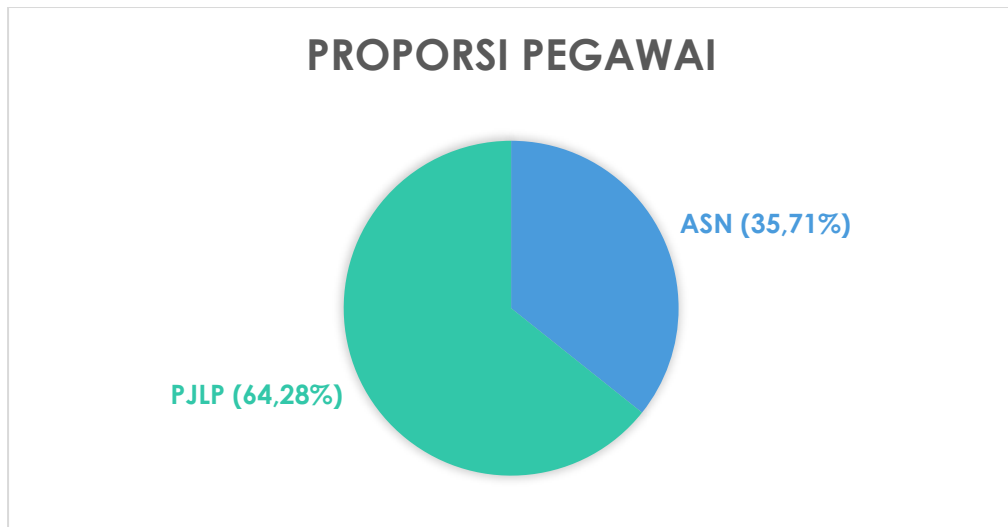
1. **Pencegahan Kebakaran:** Mengembangkan strategi pencegahan kebakaran, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memantau kepatuhan terhadap peraturan kebakaran, dan mengidentifikasi faktor risiko kebakaran.

2. **Penanganan Kebakaran:** Meningkatkan kesiapan dan responsibilitas dalam menangani kebakaran dengan pelatihan rutin bagi personel DAMKAR, memastikan ketersediaan peralatan dan teknologi terkini, dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait.
3. **Penyelamatan:** Mengembangkan kemampuan dalam penyelamatan korban kecelakaan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya, serta memperkuat kerjasama lintas sektoral.
4. **Inovasi dan Peningkatan Kapasitas:** Mendorong inovasi dalam teknologi pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan proses kerja DAMKAR untuk peningkatan kapasitas.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi ini, DAMKAR Gresik berperan penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan melindungi keselamatan serta keamanan masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku.

1.4. Sumber Daya Manusia

Secara operasional, pada tahun anggaran 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik memiliki 140 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas 50 (Lima Puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 90 Orang Penyedia Jasa Lepas Perorangan (PJLP) sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang.



Gambar 1.3 Proporsi Pegawai DAMKAR 2023

1.5. Sistematika Penulisan

LKJiP DAMKAR Gresik ini disusun dengan sistematika Penyusunan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang antarlain adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Penyajian dari penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Merupakan penyajian atas uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025, yang memuat terkait dengan Perencanaan Strategis DAMKAR Gresik, penjelasan terkait Indikator sasaran serta program dan rencana aksi yang akan dicapai.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan penyajian atas tentang kinerja DAMKAR Gresik tahun 2025 yang meliputi, pengukuran capaian kinerja Tahun

2025, analisis sebab atas keberhasilan maupun kegagalan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, dan realisasi atas anggaran dan belanja DAMKAR Gresik Tahun 2025.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan simpulan umum atas capaian kinerja DAMKAR Gresik di tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DAMKAR Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan organisasi secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Bab II dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan ringkasan mandat organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), serta sasaran tahunan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK).

Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik, perencanaan kinerja tahun 2025 dirancang untuk memastikan keselarasan antara kebijakan operasional perangkat daerah dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Tahun ini menjadi titik pijak penting dalam mengimplementasikan transisi paradigma kelembagaan dari layanan responsif tradisional menuju manajemen risiko kebakaran dan bencana yang proaktif, modern, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sub-bab perencanaan kinerja dalam dokumen LKjIP Tahun 2025 disusun untuk menggambarkan peta jalan pencapaian kinerja DPKP Gresik yang berlandaskan pada prinsip koherensi kebijakan. Analisis yang disajikan mencakup penjabaran visi, misi, dan tujuan strategis Bupati Gresik yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan serta sasaran strategis perangkat daerah melalui mekanisme cascading yang konsisten. Fokus utama dari bab ini adalah penyajian pohon kinerja (performance tree) yang memperlihatkan hubungan kausalitas antara aktivitas teknis di tingkat lapangan dengan hasil akhir strategis (ultimate outcome) pada tingkat kabupaten. Seluruh target tersebut

dirumuskan dengan mempertimbangkan strategi realisme fiskal serta dinamika kapasitas kelembagaan, sehingga perencanaan kinerja tidak hanya menjadi instrumen administratif, melainkan juga kerangka strategis yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

2.1. Ringkasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memandu jalannya organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Tahun 2025 merupakan periode transisi yang sangat unik bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik, di mana organisasi berada di antara dua periode perencanaan yang berbeda: sisa implementasi Renstra 2021–2026 serta fase awal pelaksanaan Renstra 2025–2029. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan secara cermat guna menghindari kevakuman maupun tumpang tindih dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja. Oleh karena itu, perencanaan kinerja tahun 2025 dirancang untuk mengakomodasi sasaran strategis dari kedua dokumen tersebut guna menjamin kesinambungan arah kebijakan organisasi agar senantiasa luput dari diskontinuitas pelayanan publik.

Pada periode pertama (Renstra 2021–2026), DPKP Kabupaten Gresik berada pada fase pembentukan identitas sebagai perangkat daerah mandiri setelah sebelumnya berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja. Fokus utama pada masa tersebut adalah membangun legitimasi institusional serta menyediakan pelayanan dasar minimal sub-urusan kebakaran sesuai amanat regulasi. Visi yang diusung adalah "Terciptanya Pelayanan, Perlindungan terhadap Masyarakat dari Ancaman Bahaya Kebakaran melalui upaya Pencegahan dan Penanggulangan serta Penyelamatan menuju Gresik Baru". Upaya organisasi dipusatkan pada pembangunan fondasi pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kerja sama lintas instansi maupun partisipasi masyarakat. Dalam fase ini, penetapan target waktu tanggap (response time) mengacu secara penuh pada standar nasional 15 menit sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Namun, realitas geografis Kabupaten Gresik yang mencakup wilayah seluas

1.191,25 km persegi dengan tantangan infrastruktur di wilayah kepulauan Bawean menjadikan target tersebut sebagai aspirasi yang menuntut dukungan anggaran sangat besar guna penambahan pos serta armada di setiap kecamatan.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, organisasi melakukan perubahan paradigma melalui tema “Akselerasi Transformasi Pelayanan Menuju Damkar Profesional, Modern, dan Responsif dalam Mendukung Ketangguhan Daerah”. Visi baru ini memberikan penekanan pada penguatan resiliensi infrastruktur daerah, profesionalisme, serta responsivitas layanan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional maupun global. Pergeseran ini merupakan respons terhadap dinamika risiko kebakaran di kawasan industri strategis, serta besarnya harapan masyarakat dan dunia usaha akan layanan pemadam kebakaran yang lebih modern serta adaptif.

2.1.1. Keselarasan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik

DPKP Kabupaten Gresik secara konsisten menyelaraskan arah kebijakan organisasi dengan mandat visi dan misi Kepala Daerah. Pada periode 2021–2026, DPKP berkontribusi pada pencapaian visi "Gresik Baru" melalui penguatan infrastruktur dasar. Memasuki periode 2025–2029, kontribusi tersebut dipertajam guna mendukung transformasi ekonomi yang berlandaskan pada infrastruktur strategis yang tangguh dan berkelanjutan.

Selain itu DPKP Kabupaten Gresik memastikan bahwa setiap kebijakan teknis senantiasa selaras dengan mandat pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Analisis perbandingan menunjukkan adanya pergeseran fokus dari penyediaan infrastruktur dasar menuju perlindungan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel II-1 Matriks Keselarasan Visi Misi Bupati Gresik

Dimensi	Renstra Periode 2021–2026	Renstra Periode 2025–2029
Visi	Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.	Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dimensi	Renstra Periode 2021–2026	Renstra Periode 2025–2029
Misi	Misi 2: Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing Memakmurkan Desa dan Menata Kota.	Misi 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.
Fokus PD	Penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.	Akselerasi transformasi pelayanan menuju Damkar profesional, modern, dan responsif dalam mendukung ketangguhan daerah.

Penyajian matriks di atas memberikan ilustrasi evolusi paradigma perencanaan daerah yang beralih dari penguatan kapasitas institusional dasar menuju resiliensi wilayah yang bersifat integratif. Pada periode 2021–2026, misi yang diemban berfokus pada upaya membangun infrastruktur berdaya saing melalui pelayanan dasar pemadam kebakaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Memasuki periode 2025–2029, terjadi penajaman fokus kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan infrastruktur guna mendukung posisi daerah sebagai motor penggerak ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran merupakan elemen fundamental yang harus terintegrasi dalam siklus pembangunan ekonomi daerah. Penyelarasan tematik ini merupakan landasan bagi penetapan sasaran strategis organisasi yang lebih adaptif serta menjadi pondasi bagi perumusan indikator kinerja utama pada tahapan selanjutnya.

Keselarasan kebijakan strategis DPKP Kabupaten Gresik berpijak pada identifikasi isu strategis kewilayahan yang dinamis, utamanya terkait akselerasi industrialisasi pada kawasan strategis nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE). Eskalasi profil risiko kebakaran industri serta ancaman insiden Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menempatkan DPKP sebagai instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan investasi daerah. Arah kebijakan organisasi diarahkan pada transformasi dari model layanan responsif-konvensional menuju manajemen risiko yang terintegrasi dan proaktif. Fokus tematik "Akselerasi Transformasi Pelayanan" menjadi jembatan utama yang

menghubungkan mandat perlindungan masyarakat dengan visi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Analisis mendalam terhadap struktur kebijakan mengungkapkan bahwa perlindungan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Misi 3 RPJMD merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas ekonomi regional. Tanpa sistem proteksi kebakaran yang andal, setiap aset pembangunan dan investasi memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana, yang pada gilirannya dapat menghambat laju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fokus perangkat daerah pada profesionalisme dan responsivitas layanan diposisikan sebagai pondasi fundamental (*foundational enabler*) yang memungkinkan terciptanya resiliensi kewilayahan. Penyelarasan tematik ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya dan program teknis DPKP memiliki kontribusi linear terhadap pencapaian target makro daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis dalam masa transisi mengalami reorientasi guna menjawab dinamika risiko di kawasan industri Kabupaten Gresik. Pergeseran ini terlihat dari rumusan sasaran yang semula berorientasi pada kinerja internal aparaturnya menjadi penguatan resiliensi masyarakat secara luas.

Reorientasi tujuan dan sasaran pada masa transisi mencerminkan perubahan prioritas dari aspek administratif internal menuju dampak nyata pada resiliensi kewilayahan. Berikut adalah matriks perbandingannya:

Tabel II-2 Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis

Elemen Strategis	<i>Renstra Periode 2021–2026</i>	<i>Renstra Periode 2025–2029</i>
Tujuan	<i>Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan.</i>	<i>Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah melalui penguatan resiliensi daerah.</i>
Sasaran 1	<i>Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.</i>	<i>Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana dan mempercepat respons penanganan kebakaran.</i>
Sasaran 2	<i>Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran.</i>	<i>Menurunkan kerugian pasca bencana.</i>

Elemen Strategis	<i>Renstra Periode 2021–2026</i>	<i>Renstra Periode 2025–2029</i>
<i>Analisis Perubahan</i>	Sasaran cenderung berorientasi pada proses internal dan legitimasi institusi baru.	Sasaran lebih berorientasi pada <i>outcome</i> kewilayahan serta pemberdayaan unit relawan tingkat desa.

Penyajian matriks di atas merefleksikan transformasi fundamental dalam strategi organisasi. Pada periode pertama (2021-2026), rumusan tujuan dan sasaran masih menitikberatkan pada aspek penguatan kapasitas internal sebagai entitas perangkat daerah yang baru terbentuk. Fokus tersebut sangat relevan pada fase inkubasi guna memastikan ketersediaan fondasi administratif serta teknis operasional yang memadai. Namun, memasuki periode kedua (2025-2029), terjadi elevasi orientasi strategis di mana organisasi memosisikan diri sebagai pilar resiliensi daerah. Sasaran yang dirumuskan kini mencakup dimensi kewilayahan yang lebih luas, seperti ketangguhan desa dan minimalisasi dampak kerugian bencana, yang menunjukkan bahwa organisasi telah melampaui fase pembangunan identitas menuju fase efektivitas dampak bagi publik.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran strategis DPKP dengan Visi dan Misi Bupati Gresik berpijak pada prinsip sinkronisasi kebijakan yang utuh. Tujuan DPKP dalam memperkuat resiliensi daerah merupakan derivasi langsung dari mandat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Misi RPJMD. Keselarasan ini dapat dianalisis melalui keterkaitan fungsi perlindungan aset investasi dan keselamatan warga dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Penjaminan rasa aman dari ancaman kebakaran serta kesiapan operasi penyelamatan merupakan elemen pendukung (*enabler*) utama agar seluruh program strategis Kepala Daerah dapat terlaksana dengan minim risiko gangguan kedaruratan. Dengan demikian, keberadaan sasaran DPKP merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Upaya harmonisasi dilakukan melalui sinkronisasi sisa target kinerja periode berjalan ke dalam kerangka kerja periode selanjutnya guna menjamin

kesinambungan pembangunan. Harmonisasi ini memastikan bahwa setiap inisiatif yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya tetap mendapatkan perhatian dalam struktur perencanaan yang baru, sekaligus memberikan ruang bagi adaptasi terhadap isu-isu kontemporer. Kepastian keberlangsungan pelayanan publik senantiasa terjaga melalui integrasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, di mana transisi dari sekadar sosialisasi umum menuju pembentukan unit Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang masif di tingkat desa menjadi jembatan strategis guna memitigasi keterbatasan sarana pos permanen.

Sebagai dasar bagi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, organisasi menyusun kerangka berpikir yang berorientasi pada hasil nyata (*result-based planning*). Pemilihan indikator didasarkan pada tiga parameter utama: (1) ketaatan terhadap standar teknis nasional yang disesuaikan dengan realisme fiskal daerah; (2) sensitivitas terhadap risiko bencana industri dan pemukiman; serta (3) akuntabilitas dalam penyajian data yang transparan. Kerangka berpikir ini menuntun organisasi untuk beralih dari penggunaan indikator yang bersifat administratif sebatas output proses, menuju indikator makro yang mampu mengukur sejauh mana tingkat resiliensi daerah meningkat serta dampak kerugian bencana dapat ditekan secara signifikan.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan yang mengalami penyesuaian signifikan, terutama pada aspek waktu tanggap (*response time*). DPKP Gresik melakukan transisi dari penetapan target idealis menuju target yang lebih akuntabel berbasis realisme fiskal.

Indikator Kinerja Utama merefleksikan peralihan dari pendekatan yang bersifat idealistik menuju pendekatan berbasis data dan realisme fiskal. Matriks perbandingan berikut menggambarkan evolusi tolok ukur keberhasilan organisasi selama masa transisi:

Tabel II-3 Analisis Transisi IKU DPKP Gresik

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2021–2026	Target Renstra 2025–2029	Analisis Transisi
Rerata Response Time	15 Menit (Standar Nasional)	48,83 Menit (Realisme Fiskal)	Penyesuaian menuju target yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kapasitas sarana.
Nilai SKM	Indeks 80 – 82	Indeks > 92	Peningkatan standar kualitas layanan seiring tingginya kepercayaan publik.
Penurunan Kebakaran	10% – 12%	12%	Konsistensi upaya mitigasi guna menekan frekuensi insiden setiap tahun.
Risiko Bencana	Penurunan Frekuensi	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	Adopsi indikator makro yang selaras dengan metodologi penilaian risiko nasional.

Penyajian matriks di atas mengonfirmasi adanya reorientasi metodologis dalam menetapkan parameter keberhasilan organisasi. Evolusi IKU dari periode pertama menuju periode kedua menunjukkan kedewasaan dalam berencana, di mana organisasi secara sadar menyelaraskan aspirasi pelayanan dengan ketersediaan ruang fiskal daerah. Penyesuaian target waktu tanggap (*response time*) dari 15 menit menjadi 48,83 menit merupakan langkah teknokratis guna menjaga marwah akuntabilitas perencanaan. Melalui penetapan angka yang lebih realistis, setiap capaian kinerja yang dilaporkan memiliki kredibilitas tinggi serta terhindar dari bias informasi akibat penetapan target yang melampaui kapasitas sarana dan prasarana eksisting.

Indikator Kinerja Utama memiliki posisi sentral dalam menyelaraskan operasional teknis dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. IKU *Response Time* dan *Indeks Risiko Bencana* merupakan alat ukur langsung bagi tercapainya sasaran "Meningkatkan ketangguhan desa dan mempercepat respons kebakaran". Keberhasilan menekan angka IRB serta menjaga stabilitas waktu tanggap memiliki peran krusial dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Gresik, khususnya Misi 3 terkait pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi makro, IKU ini berfungsi sebagai penjamin stabilitas iklim investasi di kawasan industri strategis. Dengan

terjaganya tingkat risiko bencana melalui indikator yang terukur, Kabupaten Gresik mampu memberikan kepastian rasa aman bagi pelaku usaha, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap kokoh dan berkelanjutan.

Harmonisasi serta kepastian keberlangsungan sasaran pada periode selanjutnya dijamin melalui penggunaan basis data realisasi tahun 2025 sebagai *baseline* bagi Renstra 2025–2029. Analisis mendalam menunjukkan bahwa integrasi indikator

"Penurunan Kejadian Kebakaran" yang tetap konsisten di angka 12% memberikan sinyal kesinambungan program mitigasi yang telah teruji efektivitasnya. Kepastian ini sangat penting agar kebijakan organisasi tetap berada pada jalur yang benar (*on-track*) serta luput dari risiko perubahan orientasi yang mendadak. Proses transisi ini memastikan bahwa setiap investasi anggaran pada tahun berjalan memiliki kontribusi yang akumulatif terhadap pencapaian target jangka menengah periode berikutnya, sehingga efisiensi sumber daya dapat tercapai secara maksimal.

Dasar pengukuran serta kerangka berpikir pemilihan indikator disusun melalui pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) yang menekankan pada hubungan kausalitas yang kuat. Pemilihan IKU didasarkan pada tiga pilar fundamental: (1) **Standarisasi Regulasi**, yang merujuk pada pemenuhan SPM Sub-urusan Kebakaran; (2) **Prinsip SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), guna memastikan setiap indikator dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik; dan (3) **Kebutuhan Kewilayahan**, yang mempertimbangkan heterogenitas risiko di 18 kecamatan. Kerangka berpikir ini menuntun organisasi untuk memilih indikator yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan strategis, seperti eskalasi aktivitas industri di JIPE dan KEK. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan merupakan manifestasi dari perencanaan yang adaptif serta berorientasi pada dampak nyata bagi perlindungan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gresik.

Tabel II-4 IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

PERIODE RENSTRA	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
2021-2026	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan	hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka sesuai PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

PERIODE RENSTRA	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
	dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	penanganan kebakaran dan Penyelamatan	Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
2021-2026	Menurunnya angka kejadian kebakaran	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	jml kejadian kebakaran th lalu dikurangi jml kejadian kebakaran th sekarang, dibagi jml kejadian kebakaran tahun lalu	laporan kejadian kebakaran
2025-2029	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Satuan pengukuran adalah menit, dengan rentang 0–60 menit. Target kinerja mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, armada, peralatan, cakupan wilayah kerja, serta kondisi infrastruktur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, indikator ini dinyatakan tercapai sempurna apabila rata-rata response time pelayanan pemadaman kebakaran setiap tahun tidak melebihi 48,83 menit (sesuai Target sasaran renstra).	Pencatatan Internal / Data Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2. Pohon Kinerja (Performance Tree) dan Mekanisme Cascading

Penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didasarkan pada prinsip keselarasan programatik yang menghubungkan mandat strategis pimpinan daerah dengan aktivitas operasional di lapangan. Melalui instrumen Pohon Kinerja (Performance Tree) dan mekanisme Cascading, organisasi memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan memiliki kontribusi linear terhadap pencapaian visi besar Kabupaten Gresik. Transformasi dari perencanaan yang bersifat administratif menuju perencanaan berbasis hasil (result-oriented) diwujudkan melalui penjabaran hierarkis yang sistematis, guna menjamin bahwa target makro daerah dapat dijangkau melalui rencana kerja yang terukur serta implementatif.

Pohon kinerja DPKP Gresik menggambarkan hubungan logis antara hasil akhir pembangunan daerah dengan aktivitas teknis di tingkat sub-kegiatan. Struktur ini memastikan setiap alokasi anggaran memiliki kontribusi nyata terhadap indikator makro kabupaten yang mengakomodir masa transisi antar periode perencanaan.

Sebagai instrumen strategis, Pohon Kinerja (*Performance Tree*) dan mekanisme *Cascading* dirancang untuk menyatukan visi pembangunan jangka menengah yang berbeda melalui proses harmonisasi indikator teknis. Penyelarasan ini dilakukan dengan cara menyesuaikan serta menyamakan kinerja dan indikator kegiatan pada Renstra periode 2025–2029 agar selaras dengan kerangka kerja Renstra periode 2021–2026. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap rencana aksi tetap terukur serta luput dari risiko kekosongan target kinerja yang dapat menghambat pencapaian visi besar Bupati Gresik di lapangan.

2.2.1. Pohon Kinerja (Performance Tree)

Pohon Kinerja DPKP Kabupaten Gresik merupakan visualisasi logis yang menggambarkan hubungan kausalitas antara hasil akhir pembangunan daerah (Ultimate Outcome) dengan sasaran strategis perangkat daerah. Struktur ini disusun guna menjawab isu strategis mengenai eskalasi risiko bencana di kawasan industri serta kebutuhan akan resiliensi infrastruktur berkelanjutan. Pohon kinerja ini mengintegrasikan indikator makro kabupaten dengan indikator teknis dinas.

Pohon Kinerja DPKP Kabupaten Gresik tahun 2025 merepresentasikan struktur logika yang menghubungkan hasil antara periode perencanaan lama dengan arah kebijakan baru. Analisis terhadap pohon kinerja ini mengungkapkan adanya evolusi mandat dari penyediaan infrastruktur berdaya saing menuju transformasi ekonomi yang ditopang oleh infrastruktur tangguh. Harmonisasi dilakukan melalui penyelarasan indikator makro kabupaten dengan indikator teknis dinas, di mana target-target pada Renstra 2025–2029 disesuaikan agar tetap berkesinambungan dengan pencapaian yang telah diraih pada periode 2021–2026.

Tabel II-5 Pohon Kinerja

Level Kinerja	Kinerja / Outcome Renstra Periode 2021–2026	Indikator Kinerja Renstra Periode 2021–2026	Target Renstra Periode 2021–2026	Kinerja / Outcome Renstra Periode 2025–2029	Indikator Kinerja Renstra Periode 2025–2029	Target Renstra Periode 2025–2029
Ultimate Outcome	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,62	Transformasi ekonomi didukung infrastruktur strategis yang tangguh.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-
Strategic Outcome (CSF)	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	7,4	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	129,42
Intermediate Outcome (Sasaran PD)	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	12%	Meningkatkan ketangguhan desa & mempercepat respons kebakaran.	Rerata <i>Response Time</i> Penanganan Kebakaran	48,83 Menit
Intermediate Outcome (Sasaran PD)	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan Penyelamatan	92,4			
Program Outcome I	Pemenuhan target sasaran program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Terlaksananya layanan pemadam kebakaran sesuai ketentuan SPM.	Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran	100%
Program Outcome II	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit.	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran layanan terpilah radius 7,5 km dari pos (15 menit menuju lokasi kejadian))	81,92	Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL)	81,92

Analisis terhadap matriks pohon kinerja tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan telah berhasil mengonversi visi "Gresik Baru" menjadi strategi "Resiliensi Infrastruktur" tanpa mengubah fondasi operasional pelayanan dasar. Penyesuaian indikator dari Indeks Kepuasan Infrastruktur menuju Rerata Response Time merupakan upaya penyelarasan agar target periode terbaru tetap berpijak pada realitas kapasitas yang telah dibangun sejak periode sebelumnya. Struktur ini memastikan bahwa eskalasi isu strategis dapat ditangani melalui kerangka kerja yang sudah teruji namun lebih tajam secara metodologis.

Identifikasi isu strategis dalam pohon kinerja mengungkap beberapa tantangan fundamental yang mendasari arah kebijakan transisi organisasi:

1. **Eskalasi Profil Risiko Kawasan Industri:** Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan JIPE menuntut standar proteksi yang melampaui kapasitas konvensional, terutama terkait mitigasi kebakaran industri dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. **Dominasi Layanan Penyelamatan (Rescue):** Terjadi pergeseran beban kerja di mana operasi penyelamatan non-kebakaran kini mencapai 52,84% dari total layanan, yang menuntut redefinisi mandat institusional melampaui sebatas unit penjinak api.
3. **Kesenjangan Fiskal dan Geografis:** Luas wilayah Kabupaten Gresik serta tantangan aksesibilitas di wilayah Kepulauan Bawean (blank spot) menciptakan diskrepansi antara standar waktu tanggap nasional 15 menit dengan kapasitas riil sarana prasarana yang ada.
4. **Stagnasi Kualitas Akuntabilitas:** Laju peningkatan nilai SAKIP yang melambat memberikan sinyal perlunya transformasi manajemen kinerja dari sekadar pemenuhan administratif menuju perencanaan yang berorientasi pada dampak nyata (*outcome-oriented*).

2.2.2. Cascading

Mekanisme Cascading merupakan proses penurunan strategi utama ke dalam sasaran operasional yang lebih spesifik, kecil, dan terukur pada setiap

level jabatan. Proses ini memastikan bahwa visi besar Bupati Gresik yang tertuang dalam program Nawa Karsa diinternalisasi hingga ke level sub-kegiatan, sehingga setiap personel memahami peran individunya. Analisis mendalam terhadap mekanisme ini mengungkap adanya alur tanggung jawab koheren antara kebijakan taktis pimpinan dengan rencana aksi nyata petugas lapangan.

Pada tahun transisi 2025, proses ini dilakukan dengan menyelaraskan indikator kegiatan dari Renstra 2025–2029 agar identik dengan nomenklatur dan target pada Renstra 2021–2026. Analisis detail terhadap mekanisme ini membuktikan bahwa visi besar Bupati Gresik terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan terinternalisasi sepenuhnya melalui rencana kerja yang dapat dicapai oleh seluruh personel di garda terdepan.

Mekanisme Cascading yang merupakan instrumen kritikal dalam menjamin bahwa visi besar Bupati Gresik terinternalisasi secara linear hingga ke tingkat operasional paling teknis. Pada tahun transisi 2025, mekanisme ini difokuskan pada proses harmonisasi yang bertujuan untuk menyamakan parameter kinerja antara dua periode perencanaan yang berbeda. Melalui proses ini, organisasi melakukan penyesuaian nomenklatur dan target kegiatan pada Renstra 2025–2029 agar identik dengan basis capaian yang telah diletakkan pada Renstra 2021–2026, sehingga kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga tanpa adanya diskontinuitas kebijakan.

Tabel II-6 Cascading Kinerja

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
1	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Terwujudnya transformasi ekonomi gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas rumah kaca	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK,	K. Strategis		Bupati Gresik
2	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK,	K. Urusan		Bupati Gresik
3	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rerata Response Rate Penanganan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP GRESIK)	K. Taktis		Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
4	Pemenuhan target sasaran program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Terlaksananya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Sub urusan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP GRESIK)	K. Taktis	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sekretaris Dinas
5	Pemenuhan Layanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah Penanganan Kebakaran	Memenuhi Capaian SPM DAMKAR Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP GRESIK)	K. Taktis	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEPALA BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
6	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
7	Terlaksananya layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
8	Teriaksananya Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal.	Teriaksananya Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
9	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN PERSONIL

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
1 0	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi dan Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi dan Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARA NA
1 1	Terlaksannnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Terlaksannnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARA NA

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
1 2	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
1 3	Pemenuhan layanan pemeriksaan, Penilaian dan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Meningkatkan tingkat cakupan layanan proteksi kebakaran di wilayah Kabupaten Gresik sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku	Tingkat Cakupan Layanan Inspeksi Proteksi Kebakaran di Wilayah Gresik.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Taktis	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN
1 4	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Plt. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INSPEKSI

N O	KINERJA Renstra Periode 2021–2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGUNG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PENANGUNG JAWAB
15	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Plt. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INSPEKSI
16	Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.02.0005 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Plt. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INSPEKSI
17	Pemenuhan Layanan Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	Meningkatkan cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik	Tingkat Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Wilayah Gresik	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Taktis	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN
18	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN PERSONIL

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
1 9	Teriaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Teriaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	KEPALA SEKSI PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN PEMBINAA N PERSONIL
2 0	Memenuhi permintaan operasi pencarian dan pertolongan	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani	Memenuhi tingkat capaian mutu layanan SPM bidang kebakaran di wilayah Kabupaten Gresik	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Mutu Layanan.	DINAS PEMADAM KEBAKAR AN DAN PENYELA MATAN,	K. Taktis	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEPALA BIDANG PEMADAM AN DAN PENYELA MATAN
2 1	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan. dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan. dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	KEPALA SEKSI PEMADAM AN DAN PENYELA MATAN

N O	KINERJA Renstra Periode 2021–2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGUNG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PENANGUNG JAWAB
22	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
23	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit.	Tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran layanan terpilah radius 7,5 km dari pos (15 menit menuju lokasi kejadian))	Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Taktis	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas
24	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dimiliki	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Taktis	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
25	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	K. Operasional	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
					PENYELA MATAN,		Perencanaan Perangkat Daerah	N, PROGRAM DAN PELAPOR AN
2 6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGA N, PROGRAM DAN PELAPOR AN
2 7	Terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel	Jumlah Fasilitas administrasi keuangan OPD	Terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel	Tingkat Ketersediaan Dokumen Keuangan dan Akuntansi yang dimiliki	DINAS PEMADAM KEBAKAR AN DAN PENYELA MATAN,	K. Taktis	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
2 8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGA N, PROGRAM DAN PELAPOR AN
2 9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN	K. Operas ional	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGA N,

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENYELA MATAN,			PROGRAM DAN PELAPORAN
30	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN,	K. Operasional	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN
31	Tersedianya jasa penunjang untuk operasional kantor	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya jasa penunjang untuk operasional kantor	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN,	K. Taktis	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris Dinas
32	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN,	K. Operasional	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	K. Operasional	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
					PENYELA MATAN,			DAN KEPEGAW AIAN
3 4	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran yang mendukung kelancaran tugas kedinasan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran yang mendukung kelancaran tugas kedinasan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARA AN DAN PENYELA MATAN,	K. Taktis	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
3 5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN
3 6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN
3 7	Tersedianya Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
								KEPEGAW AIAN
3 8	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN
3 9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN
4 0	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN
4 1	Terpeliharanya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan sehingga siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan sehingga siap pakai	Tingkat Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	DINAS PEMADAM KEBAKAR AN DAN PENYELA MATAN,	K. Taktis	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Sekretaris Dinas

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
							Pemerintahan Daerah	
4 2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4 3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4 4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,	K. Operasional	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

N O	KINERJA Renstra Periode 2021– 2026	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode2021–2026	KINERJA Renstra Periode 2025–2029	INDIKATOR KINERJA Renstra Periode 2025–2029	SKPD PENANGU NG JAWAB	JENIS	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB- KEGIATAN	PENANGU NG JAWAB
4 5	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	DINAS PEMADAM KEBAKARA N DAN PENYELA MATAN,	K. Operas ional	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN

Analisis detail terhadap proses cascading ini memberikan kepastian bahwa visi Bupati Gresik untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan terkonversi menjadi tugas operasional teknis. Sebagai contoh, strategi besar dalam "Meningkatkan Ketangguhan Infrastruktur" diterjemahkan oleh Bidang Pencegahan menjadi "Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran", yang kemudian dioperasikan oleh Kasi Pendataan menjadi target "Jumlah Dokumen Penilaian Sarana Prasarana". Mekanisme ini menjamin bahwa kebijakan daerah luput dari risiko berhenti sebatas narasi di papan strategi, melainkan benar-benar teraplikasikan melalui indikator output yang dapat digapai serta dievaluasi secara periodik. Penyelarasan ini juga menjadi pondasi bagi efisiensi anggaran, karena setiap alokasi belanja dalam sub-kegiatan memiliki korelasi langsung dengan upaya penurunan indeks risiko bencana kabupaten secara keseluruhan.

Analisis terhadap proses cascading tersebut mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menuntut penajaman arah kebijakan:

1. **Risiko Diskontinuitas Indikator:** Adanya perbedaan parameter antara indeks kepuasan dengan rerata waktu tanggap menuntut proses penyamaan target yang sangat hati-hati agar capaian historis tetap terekam secara akurat.
2. **Kesenjangan Kapasitas Operasional:** Penurunan strategi dari level taktis menuju operasional mengungkap adanya defisit personil yang berpotensi menghambat pemenuhan target "Response Time" di wilayah blank spot seperti Bawean.
3. **Formalisasi Relawan sebagai Solusi Fiskal:** Strategi pemenuhan target melalui unit REDKAR di 210 desa merupakan respons atas keterbatasan anggaran untuk pembangunan pos permanen baru.

Guna memastikan visi besar daerah terapikasi secara efektif, strategi dan arah kebijakan dipertajam melalui:

1. **Penyelarasan Nomenklatur Secara Presisi:** Menyamakan indikator output pada level operasional (Kepala Seksi) antara kedua periode perencanaan guna menjamin kelancaran administrasi dan pelaporan kinerja.
2. **Implementasi Reward-Punishment Berbasis IKU:** Menjadikan target harmonised (seperti capaian SPM 100%) sebagai dasar evaluasi kinerja individu bagi seluruh jajaran struktural.
3. **Digitalisasi Pelaporan Operasional:** Mengintegrasikan setiap laporan kesiapsiagaan dan laporan penanganan ke dalam sistem informasi terpadu guna meningkatkan validitas data yang disajikan dalam cascading.

Analisis detail terhadap proses ini memberikan kepastian bahwa strategi transformasi pelayanan menuju damkar profesional merupakan kelanjutan logis dari pembangunan fondasi yang telah diletakkan sejak periode sebelumnya. Mekanisme ini menjamin bahwa visi Bupati Gresik luput dari risiko berhenti sebatas narasi di tingkat pimpinan, melainkan benar-benar teraplikasikan melalui rencana kerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dicapai secara nyata.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan komitmen yang memuat penugasan dari atasan pemberi amanat kepada penerima amanat guna melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 ditandatangani oleh Kepala DPKP Gresik sebagai komitmen pencapaian target tahunan. Target indikator dalam PK 2025 didasarkan pada strategi "**Realisme Fiskal**", yaitu mempertahankan level layanan optimal sesuai kapasitas personel dan anggaran yang tersedia. Mengingat tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan, dokumen ini mengalami beberapa tahapan pemutakhiran guna menyesuaikan dengan dinamika fiskal serta reorientasi strategis organisasi.

2.3.1. Perjanjian Kinerja APBD 2025

Perjanjian Kinerja pada tahap awal tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan alokasi APBD murni yang masih mengacu pada kerangka target akhir Rencana Strategis periode 2021 – 2026. Fokus utama dalam periode ini adalah penguatan kapasitas internal serta pemeliharaan kepuasan publik terhadap layanan dasar.

Tabel II-7 Perjanjian Kinerja APBD 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja Aparatur DPKP Kabupaten Gresik Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,4	9.704.167.433,08
	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	%	12	1.555.320.052,00

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja Aparatur DPKP Kabupaten Gresik Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	PERSEN (%)	100	9.704.167.433,08
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran layanan terpilah radius 7,5 km dari pos (15 menit menuju lokasi kejadian))	PERSEN (%)	100	1.555.320.052,00

Analisis terhadap perjanjian kinerja awal ini menunjukkan komitmen organisasi untuk mempertahankan tingkat layanan prima melalui target SKM yang tinggi, meskipun masih dalam kerangka transisi menuju paradigma baru.

2.3.2. Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025

Seiring dengan kebijakan penyesuaian administratif di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten, dilakukan pergeseran anggaran yang berimplikasi pada perubahan pagu kegiatan tanpa mengubah target kinerja utama. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi belanja rutin serta mengoptimalkan distribusi sumber daya pada sub-kegiatan prioritas.

Tabel II-8 Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja Aparatur DPKP Kabupaten Gresik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,4	9.584.967.433,08
Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	%	12	1.477.827.652,00

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja Aparatur DPKP Kabupaten Gresik	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	PERSEN (%)	100	9.584.967.433,08
Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran layanan terpilah	PERSEN (%)	100	1.477.827.652,00

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
		radius 7,5 km dari pos (15 menit menuju lokasi kejadian))			

Analisis pergeseran ini mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam merespons keterbatasan fiskal daerah, melainkan tetap memprioritaskan tercapainya output pelayanan dasar yang optimal bagi warga negara.

2.3.3. Perjanjian Kinerja APBD 2025 Perubahan

Memasuki fase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD), DPKP melakukan sinkronisasi formal terhadap sasaran dan indikator kinerja agar selaras dengan dimulainya implementasi Renstra periode 2025–2029. Perubahan ini menandai peralihan dari indikator yang berorientasi administratif menuju indikator yang berfokus pada kualitas respons serta resiliensi daerah.

Tabel II-9 Perjanjian Kinerja APBD 2025 Perubahan

Sasaran Strategis (Renstra 2025–2029)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
<i>Meningkatkan ketangguhan desa, percepatan respons, & turunkan kerugian</i>	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	11.475.625.060,02

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
<i>Meningkatkan ketangguhan desa, percepatan respons, & turunkan kerugian</i>	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	9.078.510.758,00

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
<i>Meningkatkan ketangguhan desa, percepatan respons, & turunkan kerugian</i>	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	2.397.114.302,00

Penetapan IKU Response Time pada fase perubahan ini merupakan manifestasi dari penerapan prinsip realisme fiskal. Peningkatan pagu anggaran pada program teknis dialokasikan guna memperkuat sarana penanggulangan serta penyelamatan di lapangan, sejalan dengan tuntutan modernisasi layanan.

2.3.4. Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025 Perubahan

Tahapan akhir dalam siklus perencanaan tahunan melibatkan pergeseran anggaran pasca perubahan APBD guna memastikan ketepatan klasifikasi belanja serta dukungan finansial yang presisi bagi target strategis terbaru. Perjanjian ini menjadi dasar final bagi penilaian akuntabilitas kinerja instansi di akhir tahun anggaran.

Tabel II-10 Perjanjian Kinerja Pergeseran APBD 2025 Perubahan

Sasaran Strategis (Final)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
<i>Meningkatkan ketangguhan desa, percepatan respons, & turunkan kerugian</i>	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	11.475.625.060,02

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Meningkatkan ketangguhan desa, percepatan respons, & turunkan kerugian	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	9.078.510.758,00
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	2.397.114.302,00

Analisis terhadap dokumen final ini menunjukkan keselarasan yang utuh antara ketersediaan sumber daya dengan mandat pelayanan. Melalui proses harmonisasi yang bertahap, DPKP Kabupaten Gresik berhasil menjamin bahwa setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada hasil yang nyata, sehingga visi besar pimpinan daerah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan tetap dapat teraplikasi secara konsisten serta luput dari diskontinuitas kebijakan pembangunan.

2.4. Penyelarasan Program dengan Prioritas Daerah

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik secara inheren terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah yang lebih luas. Setiap sub-kegiatan yang dilaksanakan dirancang guna memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Visi Bupati Gresik melalui sembilan program prioritas yang dikenal sebagai Nawa Karsa. Penyelarasan ini merupakan manifestasi dari komitmen organisasi dalam mendukung transformasi ekonomi yang berlandaskan pada infrastruktur strategis yang tangguh serta berkelanjutan. Penyelarasan ini dilakukan melalui pendekatan teknokratis yang mempertimbangkan dinamika transisi perencanaan guna menjamin setiap rupiah belanja daerah memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

2.4.1. Integrasi dengan Nawa Karsa dan Prioritas Sektoral

Berdasarkan Rencana Aksi 2025, program teknis DPKP diselaraskan dengan pilar-pilar utama Nawa Karsa guna menjamin setiap rupiah belanja daerah memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata. Berikut adalah pemetaan keselarasan strategis tersebut:

1. **Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman):** DPKP berperan sebagai penjamin keamanan infrastruktur strategis melalui layanan pencegahan, penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta inspeksi sistem proteksi pada kawasan industri nasional seperti KEK JIPE.
2. **Gresik Tuntas:** Penyelenggaraan pelayanan darurat yang responsif serta profesional didukung oleh standar pelayanan yang transparan merupakan wujud nyata tata kelola yang akuntabel.
3. **Gresik Sehati:** Melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di 210 Desa/Kelurahan, organisasi membangun kemandirian masyarakat dalam mitigasi bencana tingkat lokal.

2.4.2. Klasifikasi, Pembatasan, dan Benchmarking Strategis

Tahun 2025 menuntut adanya Klasifikasi dan Pembatasan yang tegas terhadap ruang lingkup perencanaan guna menjamin akuntabilitas. Klasifikasi Renstra periode 2021–2026 dibatasi pada penyelesaian target operasional dasar serta pemenuhan mandat identitas dinas mandiri yang baru terbentuk. Berbeda dengan periode tersebut, Klasifikasi Renstra periode 2025–2029 difokuskan pada akselerasi transformasi pelayanan dan penguatan resiliensi infrastruktur strategis. Pembatasan ini bertujuan agar alokasi sumber daya memiliki garis demarkasi yang jelas antara biaya rutin pemeliharaan sistem eksisting dengan biaya investasi pengembangan sistem yang lebih modern.

Dalam aspek Benchmarking, DPKP Kabupaten Gresik melakukan perbandingan performa terhadap standar teknis nasional serta capaian daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan industri serupa, seperti Kota Semarang. Hasil benchmarking terhadap standar nasional waktu tanggap 15 menit mengungkap adanya selisih (gap) yang dipicu oleh luas wilayah Kabupaten Gresik yang mencapai 1.191,25 km persegi. Berlainan dengan wilayah urban yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan geografis kepulauan serta kawasan industri luas, sehingga strategi realisme fiskal dalam penetapan target 48,83 menit merupakan langkah yang lebih akuntabel guna menghindari degradasi kredibilitas perencanaan daerah.

2.4.3. Union dan Harmonisasi Kebijakan Transisi

Proses Union atau penggabungan arah kebijakan dilaksanakan melalui integrasi program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. Harmonisasi dilakukan dengan menyesuaikan serta menyamakan indikator kegiatan pada Renstra 2025–2029 agar tetap sinkron dengan basis capaian Renstra 2021–2026. Sebagai misal, indikator "Jumlah Desa Terbina" dari periode pertama diposisikan sebagai landasan bagi indikator "Jumlah Desa Terbentuk REDKAR" pada periode kedua. Penggabungan ini menjamin bahwa

setiap rencana aksi tetap terukur serta luput dari risiko kekosongan target kinerja yang dapat menghambat pencapaian visi besar daerah dalam Misi Nawa Karsa.

2.4.4. Justifikasi Kebutuhan Anggaran Strategis dan Paradoks Kapasitas

Eskalasi profil risiko kebakaran di Kabupaten Gresik menuntut adanya dukungan anggaran yang substansial serta berkelanjutan. Analisis internal mengungkap adanya "Paradoks Kapasitas", di mana capaian output pelayanan yang sangat tinggi melainkan dihasilkan oleh input sumber daya yang berada pada level kritis. Justifikasi utama bagi urgensi alokasi anggaran yang lebih besar didasarkan pada fakta-fakta teknokratis sebagai berikut:

1. **Defisit Struktural Personel:** Terdapat kekurangan personel yang mencapai 347 orang dari kebutuhan ideal 491 orang berdasarkan standar beban kerja kewilayahan.
2. **Amortisasi Armada Kendaraan:** Sebagian besar armada operasional telah melampaui usia teknis ideal, di mana beberapa unit vital berasal dari tahun produksi 1996 dan 2002, serta luput dari dukungan teknologi *power steering* yang menyulitkan manuver kedaruratan.
3. **Kesenjangan Alat Pelindung Diri (APD):** Ketersediaan APD standar bagi personel lapangan baru mencapai kisaran 10,4%, sementara APD khusus penanganan B3 masih berada pada angka nol persen.

Kondisi ini menegaskan bahwa investasi pada DPKP merupakan investasi langsung untuk melindungi aset investasi nasional dan stabilitas ekonomi daerah. Keterbatasan anggaran pada aspek pemeliharaan dan modernisasi dapat meningkatkan risiko kegagalan sistemik yang berdampak katastrofik bagi daerah.

2.4.5. Analisis Jangkauan Pelayanan dan Identifikasi *Blind Spot*

Meskipun DPKP telah berupaya mengoptimalkan empat pos wilayah eksisting, analisis spasial mengungkap adanya kesenjangan jangkauan pelayanan (*Blind spot*) yang bersifat absolut dan kritis. Masalah geografis

Kabupaten Gresik yang mencakup wilayah daratan luas serta kepulauan menciptakan tantangan pemerataan hak dasar warga negara atas rasa aman.

Titik buta pelayanan paling nyata teridentifikasi di wilayah Kepulauan Bawean, yang mencakup Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Rekam data menunjukkan nihilnya kehadiran fisik pos, armada, maupun personel permanen di wilayah tersebut, sehingga warga di Pulau Bawean luput dari jangkauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran secara setara. Selain itu, wilayah pesisir utara dan perbatasan masih menghadapi waktu tanggap yang melampaui standar ideal akibat hambatan aksesibilitas infrastruktur. Urgensi pembangunan pos permanen di lokasi-lokasi *blind spot* ini merupakan prasyarat mutlak bagi perwujudan keadilan distributif dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan instrumen implementatif yang disusun untuk menjembatani masa transisi kebijakan strategis DPKP Kabupaten Gresik. Dokumen ini mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi guna memastikan setiap target kinerja tahunan dapat direalisasikan secara efektif melalui dukungan fiskal yang akuntabel. Strategi pencapaian target 2025 didukung oleh kebijakan "Fondasi Perencanaan Adaptif", yang mengoptimalkan kemitraan melalui program CSR korporasi untuk program "Adopsi REDKAR" serta pemanfaatan dana POKIR DPRD untuk pengadaan sarana prasarana kebakaran di tingkat lingkungan.

2.5.1. Gambaran Umum

Arah kebijakan DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan resiliensi infrastruktur daerah melalui akselerasi transformasi pelayanan. Kebijakan ini merupakan derivasi langsung dari Visi Bupati Gresik dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan antara program kerja dengan sasaran strategis diwujudkan melalui dua pilar utama: pemantapan tata kelola administrasi penunjang serta peningkatan kualitas layanan teknis operasional pemadaman dan

penyelamatan. Prioritas pembangunan diarahkan pada perluasan jangkauan layanan guna memitigasi risiko pada kawasan industri strategis serta peningkatan kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana awal.

Arah kebijakan tahun 2025 dicirikan oleh Enkapsulasi indikator yang membedakan fokus substansial antar periode perencanaan. Periode Renstra 2021–2026 dienkapsulasi sebagai fase pembentukan fondasi identitas instansi mandiri dan pemenuhan layanan dasar tradisional, melainkan Renstra 2025–2029 berorientasi pada akselerasi transformasi menuju pilar resiliensi infrastruktur daerah yang modern . Harmonisasi dilakukan melalui penyelarasan target makro seperti Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan target mikro operasional guna menjaga koherensi kebijakan .

Melalui proses Union, program pemberdayaan masyarakat diintegrasikan sebagai strategi jembatan guna mengatasi keterbatasan pos permanen di wilayah blind spot. Klasifikasi dan Pembatasan diterapkan secara tegas untuk memisahkan alokasi belanja penunjang rutin dari belanja teknis operasional, di mana pembatasan indikator response time pada angka 48,83 menit merupakan bentuk realisme fiskal yang didasarkan pada Benchmarking terhadap kapasitas sarana prasarana riil serta perbandingan dengan standar pelayanan di wilayah dengan profil risiko serupa .

2.5.2. Rencana Program dan Kegiatan

Seluruh rencana aksi tahun 2025 selaras dengan mandat Perjanjian Kinerja (PK) yang menitikberatkan pada dua pilar utama :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01):** Mendukung tata kelola administrasi dan gaji personel guna menjamin stabilitas internal DPKP Gresik.
2. **Program Pencegahan, Penanggulangan, & Penyelamatan (1.05.04):** Merupakan inti operasional yang menjalankan misi proteksi masyarakat dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seiring dinamika risiko di kawasan industri strategis di kabupaten gresik.

Berikut adalah matriks penjabaran operasional yang memetakan hubungan antara Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan beserta alokasi anggaran untuk tahun 2025 :

Tabel II-11 Rencana Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERGESERAN APBD	PERGESERAN PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN APBD
Grand Total			11.259.487.485,08	11.062.795.085,08	11.475.625.060,00	11.475.625.060,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.704.167.433,08	9.584.967.433,08	9.078.510.758,00	9.078.510.758,00
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.702.482,00	14.702.482,00	28.749.965,00	28.749.965,00
		1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.474.214,00	10.474.214,00	10.481.697,00	10.481.697,00
		1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.228.268,00	4.228.268,00	18.268.268,00	18.268.268,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.148.970.264,08	6.148.970.264,08	5.370.180.439,00	5.370.180.439,00
		1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.141.962.825,08	6.141.962.825,08	5.363.173.000,00	5.363.173.000,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERGESERAN APBD	PERGESERAN PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN APBD
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.052.060,00	3.052.060,00	3.052.060,00	3.052.060,00
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.955.379,00	3.955.379,00	3.955.379,00	3.955.379,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.171.487,00	233.971.487,00	384.159.354,00	384.159.354,00
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.208.000,00	15.208.000,00	15.208.000,00	15.208.000,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.129.200,00	46.129.200,00	46.129.200,00	46.129.200,00
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.037.234,00	30.037.234,00	30.037.234,00	30.037.234,00
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.416.600,00	35.416.600,00	35.416.600,00	35.416.600,00
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.389.000,00	57.189.000,00	56.529.000,00	56.529.000,00
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.991.453,00	49.991.453,00	200.839.320,00	200.839.320,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.743.779.600,00	2.743.779.600,00	2.752.080.000,00	2.752.080.000,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.199.600,00	194.199.600,00	202.500.000,00	202.500.000,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.549.580.000,00	2.549.580.000,00	2.549.580.000,00	2.549.580.000,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.543.600,00	443.543.600,00	543.341.000,00	543.341.000,00
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.200.000,00	123.200.000,00	163.897.400,00	163.897.400,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.700.000,00	25.700.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	251.643.600,00	251.643.600,00	251.643.600,00	251.643.600,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERGESERAN APBD	PERGESERAN PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN APBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.555.320.052,00	1.477.827.652,00	2.397.114.302,00	2.397.114.302,00
	1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.313.709.651,00	1.281.657.251,00	2.075.545.651,00	2.075.545.651,00
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.795.200,00	4.795.200,00	19.015.200,00	19.015.200,00
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	333.922.000,00	311.522.000,00	311.522.000,00	311.522.000,00
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251.046.799,00	251.046.799,00	251.046.799,00	251.046.799,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	4.795.200,00	132.231.200,00	132.231.200,00
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	24.935.040,00	24.935.040,00	140.785.640,00	140.785.640,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	675.453.012,00	675.453.012,00	1.128.884.812,00	1.128.884.812,00
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18.762.400,00	9.110.000,00	92.060.000,00	92.060.000,00
	1.05.04.2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	41.059.250,00	27.619.250,00	27.516.600,00	27.516.600,00
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.168.950,00	4.168.950,00	4.066.300,00	4.066.300,00
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	36.890.300,00	23.450.300,00	23.450.300,00	23.450.300,00
	1.05.04.2.04	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	24.875.400,00	24.875.400,00	150.376.300,00	150.376.300,00
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.080.200,00	20.080.200,00	57.911.800,00	57.911.800,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	4.795.200,00	92.464.500,00	92.464.500,00
	1.05.04.2.05	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>	175.675.751,00	143.675.751,00	143.675.751,00	143.675.751,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERGESERAN APBD	PERGESERAN PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN APBD
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	64.492.000,00	32.492.000,00	32.492.000,00	32.492.000,00
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	111.183.751,00	111.183.751,00	111.183.751,00	111.183.751,00

2.5.3. Alokasi Anggaran Strategis

Total alokasi anggaran final tahun 2025 sebesar **Rp11.475.625.060,02**. Distribusi anggaran ini telah diselaraskan dengan hierarki sasaran strategis dalam PK Pergeseran Perubahan.

Tabel II-12 Proporsi Alokasi Anggaran

Kode Program	Program / Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase
1.05.01	Program Penunjang (Tata Kelola Akuntabel)	9.078.510.758,00	79,11%
1.05.04	Program Pencegahan & Penyelamatan (Resiliensi)	2.397.114.302,02	20,89%

Porsi anggaran teknis (1.05.04) mengalami peningkatan signifikan pada fase Perubahan APBD guna memperkuat kapasitas respons di lapangan, atau dengan kata lain Porsi anggaran teknis diarahkan pada pemenuhan layanan dasar di 18 kecamatan, melainkan belanja pegawai tetap menjadi komponen terbesar guna menjaga keberlanjutan operasional personel.

2.5.4. Keterkaitan Rencana Kerja dengan Anggaran

Alokasi fiskal berfungsi sebagai penggerak utama dalam mencapai target kinerja tahun transisi. Analisis kesesuaian menunjukkan bahwa penetapan target Response Time 48,83 menit merupakan target optimum yang sangat realistis dan dapat dicapai saat ini berdasarkan ketersediaan sarana prasarana eksisting. Melalui Benchmarking terhadap standar nasional 15 menit, teridentifikasi kesenjangan kapasitas yang sangat lebar yang menuntut investasi kapital masif.

Analisis strategis memberikan penekanan bahwa target 48,83 menit tersebut diproyeksikan berada pada level stagnan hingga periode 2029. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari ketiadaan alokasi peningkatan pagu anggaran yang signifikan dari pihak otoritas perencanaan (TAPD dan BAPPEDA) untuk penambahan serta peningkatan sarana prasarana penunjang. Tanpa dukungan anggaran belanja modal yang memadai, upaya peningkatan target mendekati standar nasional luput dari jangkauan rasional organisasi.

Selain dari blind spot absolut di Pulau Bawean, terdapat kebutuhan mendesak untuk perluasan jangkauan layanan melalui penambahan pos di tiga lokasi strategis, yakni Kecamatan Balongpanggang, Duduk Sampeyan, dan Sidayu. Setiap penambahan pos tersebut diestimasi membutuhkan alokasi anggaran sedikitnya Rp6 Miliar per unit guna pemenuhan standar sarana dan prasarana minimal.

Analisis kesesuaian menunjukkan bahwa belanja operasional difokuskan pada pemeliharaan armada kendaraan tahun 1996 dan 2002 guna menjaga kesiapsiagaan di empat pos wilayah. Terdapat pembatasan pada belanja modal Alat Pelindung Diri (APD) yang baru terpenuhi 10,4%, sehingga organisasi menerapkan strategi prioritas pada penanganan insiden berisiko tinggi.

2.5.5. Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana kerja dipimpin oleh Kepala Dinas dengan pembagian tanggung jawab teknis kepada jajaran Kepala Bidang sesuai mekanisme cascading. Jadwal pelaksanaan dibagi ke dalam empat triwulan dengan fokus intensifikasi inspeksi pada musim kemarau serta percepatan serapan anggaran pada belanja penunjang. Pihak yang bertanggung jawab memastikan setiap indikator kegiatan selaras dengan realisasi fiskal yang telah ditetapkan.

2.5.6. Antisipasi Risiko

Strategi mitigasi risiko mencakup optimalisasi 210 unit REDKAR untuk memitigasi hambatan geografis di wilayah perbatasan dan kepulauan, sehingga pelayanan tetap prima melainkan dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, penguatan kerja sama dengan sektor industri melalui Forum Pemadam Kebakaran (FORPEKA) menjadi solusi alternatif guna menutupi keterbatasan peralatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan strategis

2.6. Target Kinerja Tahunan

Target kinerja tahunan 2025 disusun melalui proses Union dan Harmonisasi yang menyatukan indikator akhir Renstra 2021–2026 dengan indikator awal Renstra 2025–2029. Hal ini dilakukan guna menjamin garis demarkasi yang jelas antara target kepuasan masyarakat yang berkelanjutan dengan inisiasi target resiliensi daerah yang baru. Melalui Benchmarking terhadap standar nasional, organisasi melakukan Klasifikasi dan Pembatasan target waktu tanggap yang realistis sebagai wujud akuntabilitas publik.

Tabel II-13 Target Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Klasifikasi Periode
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,40	Union Renstra 2021-2026
2	Rerata Response Time Rate Penanganan	Menit	48,83	Harmonisasi Renstra 2025-2029
3	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	%	12,00	Union Lintas Periode
4	Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran	%	100,00	Mandat Wajib Tahunan

Tabel II-14 Target Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Periode Renstra
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	Renstra 2021-2026
2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81,92	Renstra 2025-2029
3	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, & Penyelamatan			
		Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran	%	100	Renstra 2021-2026
4		Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	%	12	Renstra 2025-2029

Tabel II-15 Target Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% (Persen)	100
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
	Jumlah Fasilitas administrasi keuangan OPD	% (Persen)	100
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	% (Persen)	100
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Penanganan Kebakaran	% (Persen)	100
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	% (Persen)	100
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	% (Persen)	100
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani	% (Persen)	100

Target kinerja ini diposisikan sebagai jangkar akuntabilitas yang memastikan transformasi pelayanan tetap berpijak pada data empiris kapasitas sumber daya yang ada, sehingga setiap capaian kinerja senantiasa luput dari risiko degradasi kepercayaan publik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) APBD Murni serta APBD Perubahan.

Melalui analisis akuntabilitas ini, organisasi menyajikan gambaran objektif mengenai efektivitas penggunaan sumber daya fiskal terhadap capaian output maupun outcome pelayanan publik. Penyajian data pada bab ini mencakup pengukuran capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan tren historis, serta evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan organisasi dalam memenuhi hak dasar warga negara atas rasa aman.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PAPBD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dan indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel sebagai berikut :

Tabel III-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel skala nilai peringkat kinerja menjabarkan klasifikasi capaian berdasarkan rentang persentase sehingga memfasilitasi interpretasi hasil pengukuran; kategori yang digunakan meliputi rentang 91–100 persen (Sangat Tinggi), 76–90 persen (Tinggi), 66–75 persen (Sedang), 51–65 persen (Rendah), dan kurang dari 50 persen (Sangat Rendah). Penggunaan skala ini memungkinkan pengelompokan hasil pengukuran secara konsisten sehingga mempermudah interpretasi dan pelaporan kinerja kepada pemangku kepentingan dimana skala tersebut berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang operasional untuk menentukan prioritas tindak lanjut dan alokasi sumber daya berdasarkan kategori capaian. Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharmonisasikan antara sisa target periode 2021–2026 dengan inisiasi periode 2025–2029. Pengukuran ini menjadi dasar bagi evaluasi kedalaman dampak pelayanan publik serta efisiensi penggunaan sumber daya fiskal daerah.

3.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 merefleksikan dedikasi personel di lapangan dalam menuntaskan amanat periode transisi perencanaan strategis. Secara umum, organisasi berhasil menjaga stabilitas kualitas layanan dasar meskipun menghadapi berbagai dinamika fiskal daerah. Pengukuran Kinerja DPKP Gresik dilakukan dengan beberapa cara perbandingan, yaitu :

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 Dengan Target Perjanjian Kinerja,

Tabel III-2 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 Dengan Target Perjanjian Kinerja.

TUJUAN	:	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan			
SASARAN I	:	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan Penyelamatan	92.40	91.75	99.29 %	Sangat Tinggi
SASARAN II	:	Menurunnya angka kejadian kebakaran			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	12%	12.99 %	108.25 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata				103.77 %	Sangat Tinggi

menunjukkan nilai survei kepuasan masyarakat terealisasi 91,75 dari target 92,40 serta prosentase penurunan kejadian kebakaran terealisasi 12,99 persen dari target 12 persen, keduanya dikategorikan Sangat Tinggi. Hal ini

menegaskan bahwa capaian operasional melebihi atau mendekati target formal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sehingga memberikan dasar kuat untuk mempertahankan kebijakan operasional yang telah diterapkan. Dapat disimpulkan bahwa hasil tabel ini menjadi bukti pencapaian komitmen kinerja dan menjadi rujukan untuk menetapkan sasaran peningkatan mutu layanan pada periode berikutnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 Dengan Target Perjanjian Kinerja.

Tabel III-3 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 Dengan Target Perjanjian Kinerja.

TUJUAN		:	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			
SASARAN I		:	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran		48.83 Menit	48.82 Menit	120 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata					120 %	Sangat Tinggi

Menunjukkan realisasi 48,82 menit terhadap target 48,83 menit dengan capaian yang dikategorikan Sangat Tinggi, mengindikasikan efektivitas perbaikan proses respons, termasuk mekanisme dispatching dan koordinasi lapangan, sehingga target jangka menengah dapat dicapai atau dilampaui. Capaian tersebut mendukung arah strategis peningkatan ketangguhan infrastruktur dan menjadi dasar prioritas investasi teknis serta penguatan kapasitas respons.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 Dengan tahun sebelumnya menyajikan perbandingan realisasi tahunan untuk indikator yang sama sehingga memungkinkan identifikasi arah perkembangan,

Tabel III-4 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 Dengan tahun sebelumnya

TUJUAN	:	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan			
SASARAN I	:	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
1.	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan Penyelamatan	92.40	92.50	91.75	Menurun
SASARAN II	:	Menurunnya angka kejadian kebakaran			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
1.	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	50%	12.50 %	12.99	Meningkat

Dapat dilihat nilai survei kepuasan masyarakat tercatat 92,40 pada 2023, 92,50 pada 2024, dan 91,75 pada 2025, sedangkan prosentase penurunan kejadian kebakaran menunjukkan dinamika dari 50 persen pada 2023 menjadi 12,50 persen pada 2024 dan 12,99 persen pada 2025. Memperlihatkan adanya pergeseran kinerja antara indikator teknis dan indikator persepsi publik, yang menuntut kajian lebih mendalam terhadap faktor layanan non-teknis sehingga perlunya pelaksanaan studi akar penyebab untuk mengidentifikasi intervensi perbaikan layanan publik yang bersifat komprehensif.

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 Dengan tahun sebelumnya menyajikan perbandingan tahunan untuk indikator Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran sebagai ukuran kemajuan terhadap sasaran peningkatan ketangguhan infrastruktur daerah dan percepatan respons penanganan kebakaran di tingkat desa.

Tabel III-5 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 Dengan tahun sebelumnya

TUJUAN	:	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			
SASARAN I	:	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023	REALISASI 2024 (Baseline)	REALISASI 2025	KETERANGAN
1.	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran	48.95 Menit	48.83 Menit	48.82 Menit	Meningkat

Dapat dilihat bahwa data menunjukkan realisasi rata-rata response time pada tahun 2023 sebesar 48,95 menit, baseline 2024 sebesar 48,83 menit, dan realisasi 2025 sebesar 48,82 menit. Analisis atas perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan marginal dalam waktu respons antara 2023 dan 2025 dengan kecenderungan stabilisasi pada level yang lebih baik dibanding baseline 2024. Perbaikan ini mencerminkan efektivitas intervensi teknis dan operasional, antara lain peningkatan koordinasi dispatching, optimasi rute penugasan, serta kesiapsiagaan armada dan personel.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel ini adalah bahwa upaya peningkatan ketangguhan dan percepatan respons menunjukkan hasil yang positif secara kuantitatif, meskipun skala perbaikan bersifat incremental. Untuk memperkuat capaian dan mempercepat laju perbaikan, perlu penguatan monitoring waktu respons secara real-time, evaluasi proses dispatching, serta program peningkatan kapasitas yang terfokus pada pengurangan variabilitas response time di wilayah dengan frekuensi kejadian tinggi. Implementasi tindak lanjut tersebut akan memperbesar peluang pencapaian target renstra pada periode berikutnya.

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 dibandingkan Dengan target rencana strategis

Tabel III-6 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2021-2026 dibandingkan Dengan target rencana strategis

TUJUAN		: Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan			
SASARAN I		: Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2021	REALISASI 2025	TARGET 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan Penyelamatan	80	91.75	92.40	(-) Negatif
SASARAN II		: Menurunnya angka kejadian kebakaran			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2021	REALISASI 2025	TARGET 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Prosentase penurunan kejadian kebakaran	10%	12.99 %	12 %	(+) Positif

memperlihatkan hubungan antara kondisi baseline, realisasi tahun 2025, dan target akhir renstra. Data menunjukkan bahwa nilai survei kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja aparaturnya meningkat dari baseline awal sebesar 80 menjadi realisasi 91,75 pada 2025, sementara target akhir ditetapkan pada 92,40. Analisis kuantitatif mengindikasikan kemajuan signifikan dari titik awal baseline sehingga capaian 2025 menempatkan organisasi pada posisi yang mendekati target strategis; pergerakan ini mencerminkan efektivitas kebijakan peningkatan kapasitas, penguatan prosedur operasional, dan upaya peningkatan mutu layanan yang telah dilaksanakan selama periode renstra.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel tersebut menegaskan bahwa upaya peningkatan kinerja aparaturnya telah menghasilkan dampak positif yang substansial terhadap indikator kepuasan masyarakat, namun terdapat ruang untuk mempercepat pencapaian target akhir agar selaras dengan ambang kinerja strategis yang ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut meliputi penguatan program peningkatan kompetensi SDM yang terfokus pada aspek layanan publik, penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis

indikator kinerja utama, serta pengalokasian sumber daya untuk program perbaikan mutu layanan yang berdampak langsung pada persepsi publik. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat kesinambungan kemajuan menuju target akhir Renstra 2026.

Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 dibandingkan Dengan target rencana strategis yang mengukur capaian kinerja terhadap target akhir Rencana Strategis Renstra 2025–2029 memfokuskan pada indikator Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran sebagai tolok ukur peningkatan ketangguhan infrastruktur daerah dan percepatan respons penanganan kebakaran di tingkat desa.

Tabel III-7 Pengukuran Capaian Kinerja Renstra Periode 2025-2029 dibandingkan Dengan target rencana strategis

TUJUAN		:	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			
SASARAN I		:	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana			
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		BASELINE 2024	REALISASI 2025	TARGET 2029	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran		48.83 Menit	48.82 Menit	48.83 Menit	(+) Positif

Data komparatif memperlihatkan baseline 2024 sebesar 48,83 menit, realisasi 2025 sebesar 48,82 menit, dan target 2029 sebesar 48,83 menit. Penyajian tabel menghubungkan kondisi awal, capaian terkini, dan target jangka menengah sehingga memungkinkan penilaian tingkat kemajuan strategis serta identifikasi area intervensi yang perlu diprioritaskan.

Analisis atas data tersebut menunjukkan adanya stabilitas performa response time pada level yang sejalan dengan target renstra, dengan realisasi 2025 sedikit lebih baik dibanding baseline 2024 dan sejajar dengan target 2029. Perbaikan marginal ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah teknis dan operasional yang telah diimplementasikan, antara lain optimalisasi mekanisme dispatching, peningkatan kesiapsiagaan armada, dan penguatan koordinasi antar unit. Namun, karakter perbaikan yang bersifat incremental mengindikasikan perlunya upaya terukur untuk memperkecil variabilitas waktu

respons di wilayah dengan frekuensi kejadian tinggi serta untuk mempercepat laju perbaikan menuju ambang kinerja strategis yang lebih ambisius.

Kesimpulan yang dapat ditetapkan dari tabel tersebut adalah bahwa capaian 2025 menempatkan organisasi pada posisi yang konsisten dengan target akhir renstra, sehingga arah kebijakan dan program saat ini menunjukkan relevansi terhadap sasaran ketangguhan infrastruktur. Meski demikian pentingnya penguatan sistem pemantauan waktu respons secara real-time, penerapan analisis spasial untuk mengidentifikasi titik rawan dengan response time tinggi, serta pengembangan program peningkatan kapasitas yang terfokus pada pengurangan hambatan operasional di lapangan sehingga dapat lebih memperkuat daya tahan sistem respons dan mempercepat pencapaian target renstra 2029.

3.2. Capaian Kinerja SPM

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang standar teknis SPM kebakaran. Pada Tahun 2025, DPKP Gresik menetapkan target pencapaian SPM sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahunan, target ini berhasil dicapai penuh. Artinya, secara keseluruhan layanan kebakaran dan penyelamatan yang wajib dipenuhi kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan SPM. Pencapaian ini mencakup komponen-komponen utama seperti layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban kebakaran, waktu tanggap kebakaran, pemenuhan prosedur operasional (SOP), penyediaan sarana-prasarana, serta peningkatan kapasitas personel.

Secara rinci, beberapa indikator SPM menunjukkan capaian optimal: misalnya, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditargetkan melayani seluruh insiden tercapai 100% (173 kejadian tertangani sesuai standar respon maksimal 15 menit), pemenuhan prosedur operasional

kebakaran 100% (2 SOP yang direncanakan telah tersusun), serta peningkatan kapasitas aparatur 100% (2 personel terlatih dari target 2 orang). Bahkan pemenuhan sarana-prasarana pendukung kebakaran mencapai 95% pada triwulan III dan 100% pada akhir tahun. Sebagai ilustrasi, perolehan indikator waktu tanggap (≤ 15 menit) tercatat memenuhi target penuh dengan realisasi 173 kejadian setiap triwulan, menunjukkan konsistensi pelayanan cepat. Sebaliknya, beberapa indikator masih belum pada tingkat maksimal: misalnya persentase penerima layanan dasar baru mencapai 80% dan indikator peningkatan mutu layanan tercapai sebesar 20%. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian warga yang berpotensi mendapatkan layanan atau kepatuhan aspek kualitas belum sepenuhnya terakomodasi. Rincian capaian per indikator setiap triwulan Tahun 2025 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel III-8 Capaian Kinerja SPM DAMKAR 2025

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET				CAPAIAN			
		TRIWULAN							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
TOTAL SKOR CAPAIAN SPM DAMKAR	% (PERSEN)	25%	50%	75%	100%	30,54%	68,38%	86,50%	100,00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	% (PERSEN)	25%	50%	75%	100%	30,54%	68,38%	86,50%	100,00%
PERSENTASE / Tingkat PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	% (PERSEN)	20%	40%	60%	80%	26,67%	67,34%	80,00%	80,00%
JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI (MUTU SPM)	% (PERSEN)	5%	10%	15%	20%	3,87%	1,04%	6,50%	20,00%
JUMLAH WNI YANG HARUS DILAYANI	Orang	651	651	651	651	217	518	751	1006
Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	173	173	173	173	28	54	173	173
Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	2	2	2	2	0	0	0	2
Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	100	100	100	100	0	0	95	100
Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	0	0	0	2	0	0	0	2
Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET				CAPAIAN			
		TRIWULAN							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0

Dapat dilihat bahwa kinerja DPKP Gresik menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian 100% SPM terutama didukung pencapaian indikator kuantitatif dan prosedural. Pelayanan pemadaman dan penyelamatan, waktu tanggap, serta penyusunan SOP telah direncanakan dan terealisasi sesuai target. Namun, perlu diperhatikan faktor pemerataan mutu dan jangkauan layanan. Misalnya, analisis terhadap data operasional menunjukkan rata-rata waktu tanggap kebakaran sekitar 48,83 menit. Temuan ini menandakan bahwa capaian administratif SPM 100% selama Tahun 2025 masih terpusat pada area cakupan efektif sekitar pos pemadam eksisting (dengan radius layanan ~7,5 km). Artinya, terdapat wilayah “blind spot” yang belum terlayani secara optimal meskipun angka administratif SPM terpenuhi. Selain itu, terdapat tantangan dalam konsistensi kualitas layanan antara laporan administratif dengan kondisi lapangan. Sebagaimana dicatat dalam evaluasi sebelumnya, meski capaian SPM dilaporkan maksimal, kesenjangan mutu di beberapa daerah dapat terjadi jika tidak diiringi audit mutu internal dan penyelarasan pedoman teknis. Faktor lain seperti penyesuaian anggaran juga turut mempengaruhi: pengalokasian kembali sebagian dana operasional sempat menunda beberapa aktivitas peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur pemadam kebakaran.

pencapaian SPM sub-urusan kebakaran 2025 telah memenuhi target, mencerminkan efektivitas program pemadaman dan penyelamatan secara administratif. Untuk ke depannya, fokus perbaikan diarahkan pada pemerataan kualitas dan aksesibilitas layanan. Langkah strategis seperti perluasan jangkauan pos pemadam ke wilayah terluar, peningkatan pelibatan masyarakat dalam deteksi dini kebakaran, serta audit mutu rutin perlu dilakukan agar capaian SPM tidak hanya memenuhi nilai nominal, tetapi juga secara substansial terjamin merata. Rekomendasi ini selaras dengan arahan bahwa upaya pemenuhan SPM harus selalu “mengawal” hak konstitusional warga atas perlindungan kebakaran yang berkesinambungan.

Secara umum, capaian SPM Damkar tahun 2025 tergolong sukses dengan realisasi 100% terhadap target yang ditetapkan. Meskipun demikian, efektivitas layanan dan pemerataan perlindungan di seluruh wilayah masih memerlukan perhatian lebih lanjut, sehingga perencanaan kinerja selanjutnya perlu terus diselaraskan dengan kondisi lapangan.

3.2.1. Identifikasi Tantangan dan Hambatan Struktural

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Tahun 2025 menunjukkan capaian administratif sebesar 100% sesuai indikator yang ditetapkan dalam regulasi teknis. Capaian tersebut merefleksikan komitmen kelembagaan dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam perspektif tata kelola publik yang berorientasi pada mutu berkelanjutan, terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu dipetakan secara komprehensif guna memperkuat konsistensi kualitas layanan di seluruh wilayah.

1. Asimetri Informasi antara Pelaporan Administratif dan Dinamika Risiko Lapangan

Sistem pelaporan SPM telah mampu merekam pemenuhan indikator berbasis output dan dokumen. Namun, dinamika risiko kebakaran yang dipengaruhi faktor spasial, kepadatan penduduk, aktivitas industri, dan variabilitas cuaca memerlukan instrumen evaluasi yang lebih integratif. Perbedaan antara agregasi data administratif dan kompleksitas kejadian di lapangan berpotensi menimbulkan kesenjangan persepsi mengenai mutu layanan. Kondisi ini menuntut penguatan integrasi data operasional, spasial, dan analisis risiko dalam sistem pengukuran kinerja.

2. Disparitas Spasial dan Keterjangkauan Layanan

Sebaran pos eksisting memberikan cakupan efektif dalam radius tertentu. Wilayah dengan karakteristik kepulauan, kawasan pesisir, serta kecamatan dengan aksesibilitas terbatas menghadapi tantangan jarak tempuh dan waktu respons. Standar waktu tanggap 15 menit sebagaimana diatur dalam regulasi teknis memerlukan dukungan distribusi sarana dan unit operasional yang

proporsional terhadap luas wilayah dan kepadatan penduduk. Disparitas spasial ini menjadi perhatian strategis dalam rangka memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh warga.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompleksitas Operasional

Personel pemadam kebakaran menjalankan fungsi pemadaman dan penyelamatan secara simultan. Peningkatan permintaan layanan rescue non-kebakaran, termasuk evakuasi hewan dan penanganan kondisi lingkungan, memperluas cakupan operasional. Situasi tersebut memerlukan pengaturan regu yang adaptif, manajemen beban kerja, serta sistem cadangan personel yang terstruktur guna menjaga kesiapsiagaan dan keselamatan kerja.

4. Standarisasi Data dan Infrastruktur Informasi

Penguatan metadata, format pelaporan yang seragam, dan integrasi sistem informasi menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung evaluasi longitudinal serta benchmarking antardaerah. Keterbatasan sarana pengelolaan data dan jumlah personel pengumpul data memengaruhi kecepatan konsolidasi informasi triwulanan. Peningkatan kapasitas tata kelola data menjadi bagian integral dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja.

5. Dinamika Penganggaran dan Fleksibilitas Operasional

Perubahan prioritas anggaran tahunan serta kebutuhan operasional mendesak memerlukan fleksibilitas perencanaan belanja yang adaptif. Ketersediaan dukungan untuk pemeliharaan armada, bahan bakar, pengadaan peralatan, serta peningkatan kapasitas aparatur berperan penting dalam menjaga kontinuitas layanan publik.

6. Partisipasi dan Budaya Pencegahan Masyarakat

Efektivitas SPM kebakaran sangat dipengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencegahan risiko. Penguatan edukasi keselamatan kebakaran, pembangunan fasilitas proteksi mandiri di lingkungan padat penduduk, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan sektor industri menjadi faktor penentu dalam mengurangi potensi kejadian kebakaran.

Identifikasi tantangan tersebut menunjukkan bahwa capaian 100% SPM merupakan fondasi yang perlu diperkuat melalui pendekatan sistemik, adaptif, dan berorientasi mutu berkelanjutan.

3.2.2. Rekomendasi Solusi Strategis

Sebagai respons atas tantangan struktural tersebut, DPKP Gresik merumuskan solusi strategis yang dirancang untuk memperkuat kualitas layanan secara merata, berkelanjutan, dan selaras dengan amanat konstitusi.

1. Penguatan Audit Mutu Internal dan Verifikasi Substantif

Pelaksanaan audit mutu internal secara berkala dengan melibatkan unsur pengawasan akan memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan kondisi operasional. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan standar sarana, prasarana, serta kompetensi aparatur, sehingga capaian SPM mencerminkan kualitas layanan yang aktual.

2. Perluasan dan Dekonsentrasi Pos Layanan

Perencanaan penambahan pos pemadam di wilayah dengan jarak tempuh tinggi menjadi langkah strategis untuk menjamin penerapan standar waktu tanggap secara merata. Pendekatan berbasis peta risiko dan analisis spasial akan menjadi dasar distribusi unit reaksi cepat serta penguatan koordinasi antar-pos.

3. Pengembangan Sistem Prioritas Layanan Berbasis Klasifikasi Kedaruratan

Penyusunan pedoman internal mengenai skala prioritas kejadian akan mendukung pengambilan keputusan yang objektif dalam situasi kejadian simultan. Sistem ini memperkuat efisiensi pengerahan personel serta menjaga keselamatan publik sebagai orientasi utama.

4. Manajemen SDM Berbasis Regu Cadangan dan Relawan Terlatih

Pengaturan regu cadangan yang terstruktur serta pelibatan relawan terlatih untuk tugas berisiko rendah akan menjaga keberlanjutan kesiapsiagaan operasional. Program pelatihan berkelanjutan dan penguatan budaya

keselamatan (safety culture) menjadi pilar dalam mempertahankan profesionalitas aparatur.

5. Integrasi Sistem Informasi dan Standarisasi Metadata

Pengembangan sistem informasi SPM terintegrasi berbasis digital dan spasial akan meningkatkan akurasi pelaporan serta mendukung perencanaan berbasis risiko. Standarisasi komponen data melalui regulasi internal menjadi langkah strategis dalam memastikan konsistensi dan kemudahan benchmarking.

6. Optimalisasi Penganggaran Adaptif dan Kolaboratif

Perencanaan anggaran berbasis risiko wilayah dan kebutuhan operasional prioritas akan memperkuat ketahanan layanan. Sinergi dengan pemangku kepentingan, termasuk sektor industri dan pemerintah desa, dapat mendukung penguatan sarana proteksi kebakaran pada tingkat komunitas.

7. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat

Penguatan sosialisasi keselamatan kebakaran, pembentukan relawan lingkungan, serta pengembangan fasilitas proteksi mandiri akan mendorong terciptanya budaya pencegahan yang partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini mempertegas kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat.

Dengan implementasi solusi strategis tersebut, capaian 100% SPM Sub-Urusan Kebakaran diharapkan berkembang menjadi indikator mutu yang mencerminkan perlindungan merata dan berkesinambungan bagi seluruh warga Kabupaten Gresik, sekaligus memperkuat integritas tata kelola pelayanan publik berbasis keselamatan dan profesionalitas.

3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain

Pengukuran kinerja melalui metode benchmarking dilakukan guna memetakan posisi kompetitif serta kualitas pelayanan DPKP Kabupaten Gresik dalam konstelasi regional Gerbangkertosusila serta standar nasional. Perbandingan ini memberikan perspektif objektif mengenai hambatan geografis serta kapasitas fiskal yang membedakan karakteristik setiap daerah.

Tabel III-9 Tabel Benchmarking Kinerja

Wilayah	Realisasi Response Time	Luas (Km ²)	Wilayah	Jumlah Pos/Sektor
Standar Nasional	15,00	-	-	-
Kota Surabaya	6,50	326,81		> 20 Pos
Kab. Mojokerto	8,20	692,15		114 Pos/Unit
Kab. Sidoarjo	15,00	714,24		Terdistribusi merata
Kab. Gresik	48,83	1.191,25		4 Pos Wilayah

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa realisasi waktu tanggap DPKP Kabupaten Gresik memiliki deviasi yang lebar dibandingkan Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini dipicu oleh luas yurisdiksi Kabupaten Gresik yang mencapai 1.191,25 km² melainkan terbatas pada dukungan empat pos wilayah operasional. Berbeda dengan Kota Surabaya yang memiliki densitas pos yang tinggi di setiap wilayah urban, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan aksesibilitas pada wilayah kepulauan Bawean serta perbatasan utara-selatan yang luput dari kehadiran fisik pos permanen. Target 48,83 menit merupakan angka yang lebih akuntabel dan realistis bagi kondisi infrastruktur saat ini, guna menghindari degradasi kredibilitas perencanaan daerah jika memaksakan target ideal nasional tanpa adanya investasi modal yang proporsional.

3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran akhir tahun, berikut adalah ringkasan realisasi kinerja DPKP Kabupaten Gresik tahun 2025 :

Tabel III-10 Capaian Kinerja Indikator

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Rerata Response Time Rate Penanganan	Menit	48,83	48,83	100,00
2	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	%	12,00	12,99	108,25
3	Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,40	91,75	99,30

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan performa yang sangat progresif pada indikator **Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran** yang terealisasi sebesar **12,99%**, melampaui target awal 12,00%. Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi upaya pemadaman mitigasi pada area-area berisiko rendah guna mencegah eskalasi bencana yang lebih besar. Sementara itu, realisasi **Response Time 48,83 menit** menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap prinsip realisme fiskal yang ditetapkan dalam perencanaan, di mana capaian tersebut merupakan titik optimum berdasarkan ketersediaan empat pos wilayah saat ini, blind spot di 3 Kecamatan Perbatasan dan Blank Spot pada Kecamatan di Pulau Bawan.

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2025 mencatatkan angka agregat 91,75. Meskipun secara akumulatif angka tersebut menghadapi deviasi tipis dari target 92,40, kategori mutu pelayanan tetap

berada pada klasifikasi "Sangat Baik". Analisis terperinci per kategori layanan mengungkap karakteristik persepsi publik sebagai berikut:

1. **Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan:** Mencapai skor 92,86, terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merepresentasikan apresiasi publik yang sangat tinggi terhadap responsivitas operasional petugas saat menangani kondisi kedaruratan.
2. **Layanan Inspeksi dan Penilaian Sarpras:** Mendapatkan skor 91,73, yang mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap profesionalisme teknis dalam penegakan standar proteksi kebakaran.
3. **Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat:** Mencatatkan nilai terendah sebesar 90,68.

Hasil penelaahan internal terhadap kuesioner kualitatif menunjukkan bahwa dimensi perilaku serta etika profesionalisme petugas lapangan saat berinteraksi dengan masyarakat menjadi determinan utama dalam pembentukan skor tersebut. Terdapat harapan besar dari audiens agar narasumber senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepatutan serta keteladanan, khususnya saat berhadapan dengan kelompok masyarakat rentan maupun institusi pendidikan. Temuan ini menjadi landasan strategis bagi DPKP untuk memperkuat pembinaan karakter serta standar etika petugas pada periode Renstra selanjutnya.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun berada pada laju yang landai.

Tabel III-11 Nilai SAKIP

Tahun	Nilai LHE Internal SAKIP	Kenaikan	Predikat
2022	81,06	-	A (Memuaskan)

Tahun	Nilai LHE Internal SAKIP	Kenaikan	Predikat
2023	81,42	+0,36	A (Memuaskan)
2024	81,92	+0,50	A (Memuaskan)
2025	81,96	+0,04	A (Memuaskan)

Realisasi tahun 2025 sebesar 81,96 melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,92. Analisis terhadap nilai tersebut mengungkap bahwa peningkatan substansial memerlukan transformasi dari orientasi output administratif menuju pengukuran outcome yang lebih sensitif terhadap resiliensi daerah. Perbaikan tata kelola internal DPKP Kabupaten Gresik terutama pada mekanisme cascading serta digitalisasi pelaporan kinerja menjadi prioritas utama guna memitigasi risiko stagnasi nilai AKIP di masa mendatang.

3.4.1. Statistik Layanan Kebakaran dan Penyelamatan

Beban kerja operasional DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didominasi oleh operasi penyelamatan non-kebakaran yang melonjak secara signifikan. Total layanan yang diberikan mencakup:

1. **Layanan Penanganan Kebakaran:** Berjumlah **260 layanan**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **193 layanan** merupakan **Pemadaman Mitigasi** (lahan kosong, tumpukan sampah, tepi jalan, dan hutan perhutani) yang berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.
2. **Layanan Penyelamatan (Rescue):** Berjumlah **1.311 layanan**, mencakup evakuasi satwa liar, pelepasan cincin, hingga bantuan teknis kedaruratan lainnya.

Sebaran wilayah dengan intensitas layanan tertinggi adalah sebagai berikut:

1. **Layanan Kebakaran:** Kecamatan Menganti (56 insiden), disusul Kecamatan Kebomas (46 insiden) dan Kecamatan Driyorejo (46 insiden).
2. **Layanan Penyelamatan:** Kecamatan Kebomas (371 operasi), Kecamatan Manyar (184 operasi), dan Kecamatan Menganti (181 operasi).

Data ini memberikan justifikasi teknokratis yang kuat bagi urgensi penempatan sumber daya tambahan di wilayah urban dengan kepadatan populasi dan aktivitas industri yang tinggi seperti Kabupaten Gresik.

3.4.2. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan DPKP Gresik dalam merealisasikan target kinerja yang direncanakan dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan strategis yang antara lain:

1. **Intensifikasi Pemadaman Mitigasi:** Pemanfaatan 193 layanan pemadaman pada area berisiko rendah (lahan kosong/sampah) terbukti efektif dalam mencegah eskalasi api menuju pemukiman atau kawasan industri strategis.
2. **Kemitraan Lintas Sektor:** Sinergi melalui Forum Pemadam Kebakaran (FORPEKA) memberikan dukungan peralatan tambahan saat terjadi insiden kompleks di kawasan industri.
3. **Internalisasi Budaya Kinerja:** Tingginya dedikasi personel di garda terdepan melampaui keterbatasan sarana, yang terlihat dari capaian IKM kategori pelayanan operasional sebesar 92,86.

Keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 merupakan manifestasi dari peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan implementasi strategi preventif yang terukur. Peningkatan profesionalisme personel dalam mengeksekusi operasi evakuasi maupun pemadaman pada berbagai insiden dengan tingkat kompleksitas

tinggi telah membuahkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik yang sangat baik. Capaian strategis tersebut berjalan selaras dengan optimalisasi program mitigasi bencana yang terus dikedepankan oleh instansi. Eksekusi pemadaman dini yang berhasil direalisasikan pada 193 titik mitigasi telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target menekan angka insiden kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Gresik secara komprehensif.

Sebagai penguat ekosistem keselamatan daerah, akselerasi kinerja instansi turut ditopang oleh kolaborasi harmonis bersama elemen masyarakat melalui sinergi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Keterlibatan aktif dari relawan tingkat desa memberikan dampak esensial dalam memperpendek rantai diseminasi informasi kejadian menjadi lebih efisien dan responsif. Integrasi yang solid antara kompetensi teknis aparaturnya pemadam kebakaran dengan partisipasi komunal ini mewujudkan sistem penanggulangan kedaruratan yang berdaya guna. Elaborasi dari seluruh faktor pendorong tersebut menegaskan komitmen institusional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan tata kelola pelayanan publik yang unggul guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

3.4.3. Analisis Penyebab Kegagalan

Rendahnya capaian pada Indikator Kepuasan Masyarakat (SKM) aspek Sosialisasi dan Pemberdayaan (90,68) serta keterbatasan kemajuan nilai SAKIP (+0,04) disebabkan oleh beberapa hambatan struktural :

1. **Defisit Kompetensi Interpersonal:** Hasil evaluasi kualitatif mengungkap perlunya peningkatan standar etika serta kepatutan perilaku petugas lapangan saat berinteraksi dengan kelompok rentan dan institusi pendidikan.
2. **Keterbatasan Anggaran Investasi:** Ketiadaan alokasi dana untuk penambahan pos baru di Balongpanggang, Duduk Sampeyan, dan Sidayu menyebabkan target *response time* tetap berada pada level stagnan.

3. **Minimnya Digitalisasi:** Pengukuran kinerja masih bersifat administratif melainkan luput dari dukungan sistem informasi yang terintegrasi secara *real-time*.

Akselerasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 dihadapkan pada tantangan kapasitas input yang memerlukan perhatian berkelanjutan guna mencapai standar pelayanan prima. Kesenjangan kebutuhan personel sebanyak 347 posisi serta perlunya pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar teknis menjadi variabel utama yang membatasi kecepatan jangkauan layanan secara menyeluruh. Selain itu, sebaran infrastruktur penyelamatan masih menyisakan klasifikasi wilayah tanpa pos permanen, khususnya di Pulau Bawean, serta kebutuhan mendesak akan penambahan pos di wilayah Balongpanggang, Duduk Sampeyan, dan Sidayu. Kondisi geografis tersebut menyebabkan distribusi keadilan pelayanan kepada masyarakat masih memerlukan pemerataan lebih lanjut agar seluruh yurisdiksi dapat terjangkau dengan proporsional.

Optimalisasi waktu tanggap (*response time*) nasional 15 menit juga menemui tantangan yang cukup signifikan seiring dengan keterbatasan ketersediaan pagu anggaran untuk investasi modal baru pada sektor sarana dan prasarana. Dinamika fiskal saat ini menuntut organisasi untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara sangat selektif, sehingga upaya pemutakhiran armada dan teknologi pemadaman menjadi berjalan lebih lambat dari proyeksi ideal. Diperlukan formulasi kebijakan penganggaran yang lebih akomodatif di masa mendatang guna mendukung transformasi pelayanan penyelamatan yang lebih tangguh. Melalui pemahaman atas berbagai hambatan struktural ini, diharapkan muncul komitmen kolektif antar-sektor untuk memperkuat fundamental organisasi demi menjamin keselamatan dan ketenteraman warga Kabupaten Gresik secara berkelanjutan.

3.4.4. Pernyataan Keberhasilan dan Komitmen Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui DPKP menyatakan bahwa meskipun menghadapi masa transisi dan keterbatasan sumber daya, mandat

perlindungan masyarakat telah ditunaikan dengan integritas tinggi. Keberhasilan menuntaskan amanat Renstra 2021–2026 dengan predikat AKIP "A" merupakan bukti nyata transparansi tata kelola. DPKP Gresik berkomitmen untuk terus mengawal transisi menuju Renstra 2025–2029 dengan fokus pada akselerasi transformasi pelayanan yang modern dan responsif.

3.4.5. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Kinerja

Guna memitigasi hambatan yang teridentifikasi, langkah-langkah perbaikan strategis yang akan dilaksanakan mencakup:

1. **Reformasi Perencanaan:** Mengalihkan orientasi indikator dari output sebatas dokumen menuju *outcome* yang sensitif terhadap resiliensi daerah.
2. **Pembinaan Karakter Aparatur:** Menyelenggarakan pelatihan etika profesi serta standar pelayanan prima bagi seluruh petugas operasional guna memperbaiki skor kepuasan publik.
3. **Advokasi Pembangunan Pos:** Mendorong prioritas anggaran pada TAPD dan BAPPEDA untuk inisiasi pembangunan pos di wilayah *blind spot* dengan estimasi biaya Rp6 Miliar per pos.

Keseluruhan Evaluasi dan Analisis kinerja DPKP Kabupaten Gresik tahun 2025 memberikan simpulan bahwa DPKP Kabupaten Gresik mampu mempertahankan integritas pelayanan publik namun masih mengharapkan adanya intervensi kebijakan strategis serta dukungan anggaran yang lebih proporsional pada periode perencanaan berikutnya.

3.5. Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Dokumen anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025 menunjukkan struktur alokasi yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis berupa peningkatan ketangguhan infrastruktur, percepatan respons penanganan kebakaran, serta penguatan tata kelola internal. Realisasi pagu anggaran 2025 untuk Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercatat sebesar Rp 8.190.234.151,69 sedang untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran tercatat sebesar 1.211.404.023. Grand Total realisasi anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 9.401.638.174,69.

Alokasi anggaran 2025 menempatkan prioritas pada penguatan kapasitas internal sebagai fondasi operasional, disertai alokasi teknis untuk pencegahan dan pengadaan sarana. Penajaman alokasi berbasis risiko spasial, peningkatan investasi pada SDM fungsional, serta penguatan mekanisme pengendalian dan pemeliharaan akan mempercepat pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Tabel III-12 Alokasi Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025
Grand Total			11.259.487.485,08	11.475.625.060,00	9.394.788.174,69
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.704.167.433,08	9.078.510.758,00	8.183.384.151,69
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.702.482,00	28.749.965,00	22.488.000,00
		1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.474.214,00	10.481.697,00	5.765.000,00
		1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.228.268,00	18.268.268,00	16.723.000,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.148.970.264,08	5.370.180.439,00	5.036.882.514,36
		1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.141.962.825,08	5.363.173.000,00	5.032.523.014,36
		1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.052.060,00	3.052.060,00	1.545.000,00
		1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.955.379,00	3.955.379,00	2.814.500,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.171.487,00	384.159.354,00	177.755.485,00
		1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.208.000,00	15.208.000,00	15.147.060,00
		1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00
		1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.129.200,00	46.129.200,00	32.479.000,00
		1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.037.234,00	30.037.234,00	22.852.000,00
		1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	35.416.600,00	35.416.600,00	32.988.535,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.389.000,00	56.529.000,00	24.187.285,00
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.991.453,00	200.839.320,00	50.101.605,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.743.779.600,00	2.752.080.000,00	2.482.775.612,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.199.600,00	202.500.000,00	169.282.372,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.549.580.000,00	2.549.580.000,00	2.313.493.240,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.543.600,00	543.341.000,00	470.332.540,33
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.200.000,00	163.897.400,00	129.518.460,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.700.000,00	84.800.000,00	80.005.300,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	13.276.000,00
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	251.643.600,00	251.643.600,00	247.532.780,33

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.555.320.052,00	2.397.114.302,00	1.211.404.023,00
	1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.313.709.651,00	2.075.545.651,00	1.056.421.053,00
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.795.200,00	19.015.200,00	13.730.000,00
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	333.922.000,00	311.522.000,00	225.952.523,00
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251.046.799,00	251.046.799,00	229.654.730,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	132.231.200,00	23.747.500,00
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	24.935.040,00	140.785.640,00	0,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	675.453.012,00	1.128.884.812,00	551.726.300,00
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	18.762.400,00	92.060.000,00	11.610.000,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025
		dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	41.059.250,00	27.516.600,00	26.719.170,00
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.168.950,00	4.066.300,00	3.443.170,00
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	36.890.300,00	23.450.300,00	23.276.000,00
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.875.400,00	150.376.300,00	126.343.800,00
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.080.200,00	57.911.800,00	51.490.100,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	92.464.500,00	74.853.700,00
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	175.675.751,00	143.675.751,00	1.920.000,00
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	64.492.000,00	32.492.000,00	1.920.000,00
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	111.183.751,00	111.183.751,00	0,00

3.5.1. Ringkasan Distribusi Anggaran

1. *Komposisi utama*

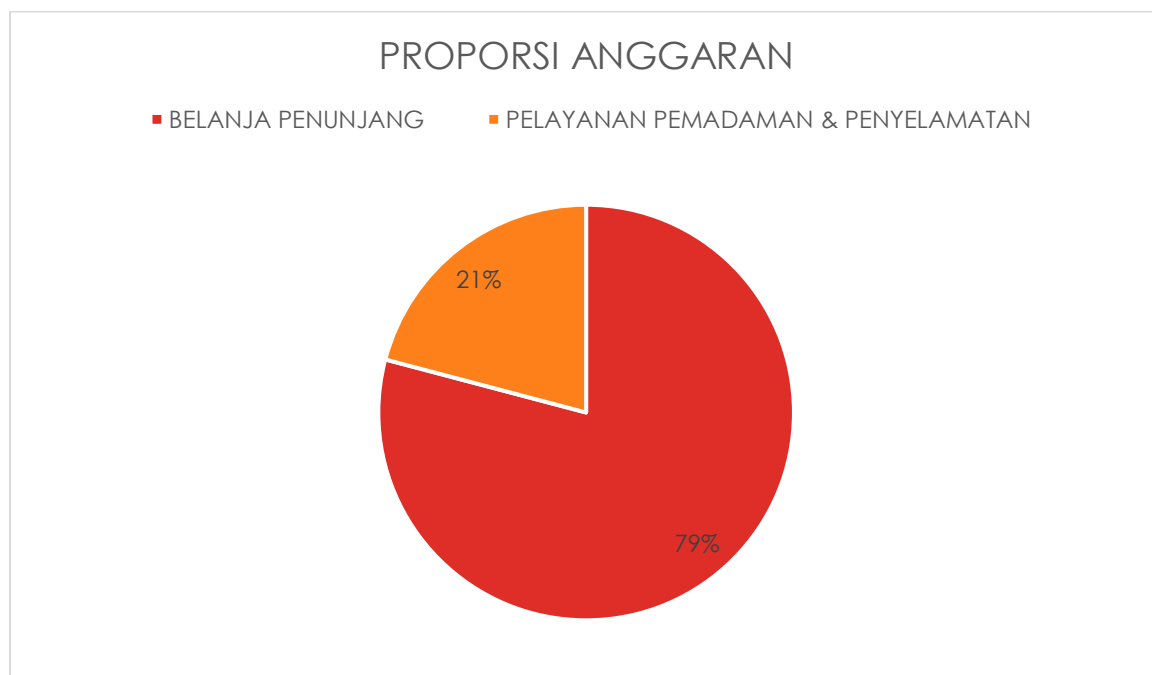
Dari total anggaran DPKP Gresik sebesar Rp 11.475.625.060,00 (P-APBD) Alokasi terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai Rp 9.078.510.758,00, sedangkan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memperoleh alokasi Rp 2.397.114.302,00 menurut ringkasan program.

2. *Proporsi terhadap total*

Berdasarkan angka realisasi, proporsi alokasi dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\left[\frac{9,078,510,758.00}{11,475,625,060.00} = 0.791112529 \right]$$

Artinya sekitar 79,11% anggaran diarahkan pada program penunjang; sisanya sekitar 20,88% diarahkan pada program teknis pencegahan dan penanggulangan.



3.5.2. Kaitan Alokasi dengan Pencapaian Tujuan

1. Dukungan terhadap outcome strategis

Alokasi besar pada program penunjang mencerminkan prioritas pada penguatan kapasitas internal (perencanaan, administrasi keuangan, pemeliharaan aset, dukungan operasional), yang menjadi fondasi untuk mencapai outcome seperti *Rerata Response Time* dan *Nilai Kepuasan Masyarakat (IKU)*. Data program dan kegiatan menunjukkan alokasi untuk penyediaan gaji, pemeliharaan BMN, serta jasa penunjang yang mendukung kesiapsiagaan operasional.

2. Investasi teknis operasional:

Alokasi pada program pencegahan dan penanggulangan diarahkan pada pengadaan sarana-prasarana, standarisasi, pembinaan aparatur, serta pengelolaan SKIK yang secara langsung memengaruhi kemampuan merespons kejadian kebakaran dan menurunkan kerugian pasca bencana. Rincian sub-kegiatan pengadaan dan standarisasi tercantum dalam tabel anggaran SPM.

3.5.3. Prioritas Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Sasaran

1. Prioritas jangka pendek (operasional):

Pemeliharaan armada dan peralatan, penyediaan gaji dan tunjangan, serta dukungan jasa operasional untuk menjaga kesiapsiagaan regu pemadam. Rincian realisasi triwulan menunjukkan aliran dana signifikan pada pos-pos tersebut.

2. Prioritas menengah (kapasitas):

Pengadaan sarana pencegahan, standarisasi proteksi kebakaran, dan pembinaan SDM (pelatihan/sertifikasi) untuk meningkatkan kualitas inspeksi dan pemberdayaan masyarakat. Tabel anggaran SPM memperlihatkan pagu khusus untuk pengadaan dan standarisasi.

3. Prioritas strategis (sistem):

Penguatan perencanaan, sistem informasi SKIK, serta pengembangan RISP KP sebagai dasar tata kelola dan perencanaan spasial layanan. Alokasi untuk pengelolaan SKIK dan dokumen perencanaan tercantum dalam sub-kegiatan terkait.

3.5.4. Mekanisme Efisiensi dan Pengendalian Anggaran

1. Penguatan integrasi perencanaan-anggaran-evaluasi:

Menjaga keterkaitan antara indikator kinerja (mis. rerata response time, capaian SPM, nilai SKM) dengan alokasi anggaran per kegiatan agar setiap rupiah dapat diukur kontribusinya terhadap outcome. Dokumen kegiatan menegaskan indikator dan target yang menjadi dasar penganggaran.

2. Pengendalian teknis:

Implementasi SOP pemeliharaan preventif aset, manajemen rantai pasok berbasis inventarisasi historis, serta mekanisme verifikasi mutu untuk pengadaan agar kualitas sarana-prasarana sesuai standar teknis. Rincian pagu untuk pengadaan dan pemeliharaan mendukung langkah ini.

3.5.5. Rekomendasi Penganggaran untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan

1. Alokasi berbasis risiko spasial:

Mengalokasikan sebagian anggaran pengadaan dan penempatan unit reaksi cepat pada wilayah blindspot untuk menurunkan rerata waktu tanggap secara merata. Data pohon kinerja dan permasalahan menyoroti kebutuhan dekonsentrasi pos layanan.

2. Penguatan investasi SDM fungsional:

Mengalokasikan anggaran terprogram untuk sertifikasi inspektur dan instruktur pemadam kebakaran sehingga kualitas inspeksi dan pemberdayaan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Tabel kegiatan mencantumkan kebutuhan pembinaan dan pelatihan.

3. Penganggaran untuk sistem dan data:

- Menyisihkan porsi anggaran untuk pemutakhiran SKIK dan RISP KP agar perencanaan spasial dan monitoring kinerja berbasis data dapat dilaksanakan secara real time. Sub-kegiatan pengelolaan SKIK tercantum dalam anggaran SPM.

3.6. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pada tahun 2025 dilakukan melalui prinsip efisiensi yang ketat. Dengan total 140 personel (50 ASN dan 90 THL), organisasi mengemban beban kerja penyelamatan yang melonjak hingga 1.311 layanan.

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya fiskal terhadap capaian sasaran teknis diukur melalui formulasi:

$$Efisiensi = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik (\%)} - \text{Realisasi Anggaran (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Fisik (\%)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Program Pencegahan dan Penyelamatan mencatatkan efisiensi positif di atas 10% pada beberapa sub-kegiatan administratif. Meskipun demikian, efektivitas operasional terancam oleh defisit 347 personel dari kebutuhan ideal serta ketersediaan APD yang baru terpenuhi 10,4%. Optimalisasi dilakukan melainkan tetap mengutamakan keselamatan petugas melalui strategi rotasi regu piket yang presisi di empat pos wilayah.

3.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

3.7.1. Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran yang dikelola DPKP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai **Rp11.475.625.060,02**. Distribusi fiskal dialokasikan melalui dua program utama yang saling menguatkan antara fungsi manajerial dengan fungsi teknis operasional.

Tabel III-13 Realisasi Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025	REALISASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN IV
Grand Total			11.259.487.485,08	11.475.625.060,00	9.394.788.174,69	1.829.112.486,29	1.858.470.413,45	2.410.290.596,95	2.616.924.578,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.704.167.433,08	9.078.510.758,00	8.183.384.151,69	1.813.694.597,29	1.803.549.796,45	2.212.962.968,95	2.353.176.789,00
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.702.482,00	28.749.965,00	22.488.000,00	0,00	6.315.000,00	354.000,00	15.819.000,00
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.474.214,00	10.481.697,00	5.765.000,00	0,00	5.415.000,00	0,00	350.000,00
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.228.268,00	18.268.268,00	16.723.000,00	0,00	900.000,00	354.000,00	15.469.000,00
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.148.970.264,08	5.370.180.439,00	5.036.882.514,36	1.154.651.009,29	1.259.416.572,45	1.222.888.882,62	1.399.926.050,00
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.141.962.825,08	5.363.173.000,00	5.032.523.014,36	1.154.651.009,29	1.259.416.572,45	1.221.224.382,62	1.397.231.050,00
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.052.060,00	3.052.060,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.955.379,00	3.955.379,00	2.814.500,00	0,00	0,00	1.664.500,00	1.150.000,00
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.171.487,00	384.159.354,00	177.755.485,00	0,00	10.082.860,00	87.377.595,00	80.295.030,00
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.208.000,00	15.208.000,00	15.147.060,00	0,00	0,00	15.147.060,00	0,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.129.200,00	46.129.200,00	32.479.000,00	0,00	2.250.000,00	8.804.000,00	21.425.000,00
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.037.234,00	30.037.234,00	22.852.000,00	0,00	1.191.000,00	21.371.000,00	290.000,00
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.416.600,00	35.416.600,00	32.988.535,00	0,00	0,00	31.988.535,00	1.000.000,00
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.389.000,00	56.529.000,00	24.187.285,00	0,00	6.641.860,00	3.543.000,00	14.002.425,00
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.991.453,00	200.839.320,00	50.101.605,00	0,00	0,00	6.524.000,00	43.577.605,00
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.743.779.600,00	2.752.080.000,00	2.482.775.612,00	650.143.588,00	464.990.616,00	648.901.699,00	718.739.709,00
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.199.600,00	202.500.000,00	169.282.372,00	20.993.588,00	48.183.536,00	28.831.759,00	71.273.489,00
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.549.580.000,00	2.549.580.000,00	2.313.493.240,00	629.150.000,00	416.807.080,00	620.069.940,00	647.466.220,00
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.543.600,00	543.341.000,00	470.332.540,33	8.900.000,00	62.744.748,00	253.440.792,33	145.247.000,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025	REALISASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN IV
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.200.000,00	163.897.400,00	129.518.460,00	8.900.000,00	24.200.000,00	36.118.960,00	60.299.500,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.700.000,00	84.800.000,00	80.005.300,00	0,00	1.907.800,00	0,00	78.097.500,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	13.276.000,00	0,00	2.841.000,00	3.585.000,00	6.850.000,00
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	251.643.600,00	251.643.600,00	247.532.780,33	0,00	33.795.948,00	213.736.832,33	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.555.320.052,00	2.397.114.302,00	1.211.404.023,00	15.417.889,00	55.700.617,00	748.878.428,00	391.407.089,00
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.313.709.651,00	2.075.545.651,00	1.056.421.053,00	15.417.889,00	48.991.617,00	735.251.928,00	256.759.619,00
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.795.200,00	19.015.200,00	13.730.000,00	0,00	0,00	0,00	13.730.000,00
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	333.922.000,00	311.522.000,00	225.952.523,00	15.417.889,00	48.991.617,00	75.592.868,00	85.950.149,00
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251.046.799,00	251.046.799,00	229.654.730,00	0,00	0,00	106.908.260,00	122.746.470,00
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	132.231.200,00	23.747.500,00	0,00	0,00	0,00	23.747.500,00
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	24.935.040,00	140.785.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	675.453.012,00	1.128.884.812,00	551.726.300,00	0,00	0,00	550.590.800,00	1.135.500,00
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18.762.400,00	92.060.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	9.450.000,00
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	41.059.250,00	27.516.600,00	26.719.170,00	0,00	5.929.000,00	12.666.500,00	8.123.670,00
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.168.950,00	4.066.300,00	3.443.170,00	0,00	0,00	0,00	3.443.170,00
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	36.890.300,00	23.450.300,00	23.276.000,00	0,00	5.929.000,00	12.666.500,00	4.680.500,00
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.875.400,00	150.376.300,00	126.343.800,00	0,00	780.000,00	0,00	125.563.800,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI 2025	REALISASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN IV
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.080.200,00	57.911.800,00	51.490.100,00	0,00	0,00	0,00	51.490.100,00
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	4.795.200,00	92.464.500,00	74.853.700,00	0,00	780.000,00	0,00	74.073.700,00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		175.675.751,00	143.675.751,00	1.920.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	64.492.000,00	32.492.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	111.183.751,00	111.183.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Realisasi Anggaran SPM

Alokasi anggaran yang secara spesifik mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran difokuskan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (1.05.04). Pada fase Perubahan APBD, pagu program ini ditingkatkan menjadi **Rp2.397.114.302,00** guna memperkuat respon operasional lapangan.

Tabel III-14 Realisasi Anggaran SPM

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN VI	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.779.735.412	15.417.889	1.555.320.052	70.338.506	1.648.820.952	-	2.397.114.302	1.133.933.675

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN VI	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.538.125.011	15.417.889	1.313.709.651	64.409.506	1.313.709.651	-	2.075.545.651	1.009.838.675
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	4.795.200	-	4.795.200	-	4.795.200	-	19.015.200	3.680.000
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	333.922.000	15.417.889	333.922.000	64.409.506	333.922.000	-	311.522.000	218.586.265
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251.046.799	-	251.046.799	-	251.046.799	-	251.046.799	211.074.110
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	4.795.200	-	4.795.200	-	4.795.200	-	132.231.200	23.747.500
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	249.350.400	-	24.935.040	-	24.935.040	-	140.785.640	-
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan.	675.453.012	-	675.453.012	-	675.453.012	-	1.128.884.812	550.590.800

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN VI	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	18.762.400	-	18.762.400	-	18.762.400	-	92.060.000	2.160.000
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		41.059.250	-	41.059.250	5.929.000	41.059.250	-	27.516.600	23.358.000
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	4.168.950	-	4.168.950	-	4.168.950	-	4.066.300	962.000,00
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	36.890.300	-	36.890.300	5.929.000	36.890.300	-	23.450.300	22.396.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		24.875.400	-	24.875.400	-	150.376.300	-	150.376.300	99.777.000
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	20.080.200	-	20.080.200	-	57.911.800	-	57.911.800	47.982.500
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	4.795.200	-	4.795.200	-	92.464.500	-	92.464.500	51.794.500
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		175.675.751	-	175.675.751	-	143.675.751	-	143.675.751	960.000
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	64.492.000	-	64.492.000	-	32.492.000	-	32.492.000	960.000,00
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN VI	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		manusia/penyelamatan dan evakuasi								
	1.05.04.2.05.000 4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.04.2.05.000 5	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	111.183.751,0 0	-	111.183.751,0 0	-	111.183.751,0 0	-	111.183.751,0 0	-

3.7.3. Analisa Capaian dan Anggaran Terhadap SPM

Setiap rupiah yang dialokasikan pada program teknis berkontribusi linear terhadap pemenuhan hak dasar warga negara. Meskipun porsi anggaran teknis berada pada kisaran 20,89% dari total belanja dinas, efektivitas penyerapannya mampu menghasilkan capaian fisik SPM sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi telah mencapai titik optimalitas dalam mengonversi anggaran operasional (BBM, logistik, pemeliharaan) menjadi output pelayanan langsung, melainkan tantangan pemenuhan sarana fisik permanen tetap memerlukan dukungan belanja modal yang lebih besar.

3.7.4. Analisa Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja DPKP Gresik

Realisasi anggaran pada Program Penunjang (1.05.01) sebesar **Rp9.078.510.758,00** memiliki peran krusial sebagai fondasi administratif. Porsi terbesar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel sebesar Rp5.032.523.014,36. Hal ini memberikan kepastian stabilitas bagi 140 personel yang menjalankan misi multidimensi penyelamatan. Penyelarasan alokasi dana terhadap IKU *Response Time* 48,83 menit membuktikan bahwa strategi anggaran tahun 2025 melampaui sebatas pembiayaan rutin, melainkan merupakan investasi untuk menjaga resiliensi daerah di tengah eskalasi risiko kawasan industri.

Investasi fiskal pada tahun 2025 terfokus pada pemeliharaan keandalan armada operasional tahun produksi 1996 dan 2002 guna mencapai target response time. Meskipun capaian fisik pelayanan dasar mencapai 100%, organisasi menghadapi tantangan pada belanja modal Alat Pelindung Diri (APD) yang baru terpenuhi sebatas 10,4% dari kebutuhan ideal. Keterbatasan alokasi dari otoritas perencanaan (TAPD dan BAPPEDA) menyebabkan target kinerja pada aspek sarana prasarana cenderung stagnan, melainkan dedikasi personel di lapangan mampu menutupi kesenjangan sumber daya tersebut melalui optimalisasi unit-unit yang ada.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja Strategis Tahun 2025

Penyelenggaraan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2025 merefleksikan dedikasi organisasi dalam memenuhi mandat perlindungan masyarakat di tengah transisi kebijakan perencanaan daerah. Secara umum, target-target strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui ambang batas yang ditetapkan.

Transformasi beban kerja yang menunjukkan dominasi layanan penyelamatan (rescue) dibandingkan pemadaman kebakaran menjadi indikator bahwa kehadiran DPKP kini semakin diandalkan oleh publik dalam berbagai aspek kedaruratan. Pencapaian predikat SAKIP "A" dengan nilai 81,96 menegaskan komitmen tata kelola yang akuntabel, meskipun disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu terus diupayakan guna menghadapi tantangan inovasi dan keterbatasan dukungan fiskal terhadap sarana prasarana.

4.2. Rekomendasi Strategis Masa Depan

Berdasarkan analisis capaian dan hambatan tahun 2025, dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Penguatan Karakter Pelayanan:** Melakukan pembinaan etika serta profesionalisme petugas lapangan secara berkala guna memperbaiki kualitas interaksi publik dan meningkatkan skor SKM.
2. **Pemerataan Jangkauan Pelayanan:** Inisiasi pembangunan pos permanen di Pulau Bawean serta wilayah *blind spot*

(Balongpanggang, Duduk Sampeyan, Sidayu) dengan dukungan anggaran minimal Rp6 Miliar per unit guna mewujudkan keadilan akses layanan.

3. **Modernisasi Berbasis Teknologi:** Akselerasi pengembangan "Gresik Command Center 4.0" guna digitalisasi pelaporan kinerja serta pemetaan risiko berbasis GIS yang lebih akurat.
4. **Investasi Alat Pelindung Diri:** Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan belanja modal untuk APD standar dan khusus B3 yang saat ini masih berada pada level kritis, demi menjamin keselamatan nyawa petugas di garis depan.

Laporan ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi penyusunan kebijakan pada periode Renstra 2025–2029 guna mewujudkan Kabupaten Gresik yang aman, tangguh, dan berketahanan bencana.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



SUYONO, SH.S.Sos.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680314 199309 1 002